

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PENGELOLAAN OBJEK PARIWISATA
DI KABUPATEN BATUBARA**

SKRIPSI

Oleh:
TRI NURANI
NPM. 1803100088

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : TRI NURANI
NPM : 1803100088
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Rabu, 08 Mei 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.** (.....)

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP** (.....)

PENGUJI III : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : TRI NURANI
NPM : 1803100088
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Pengelolaan Objek Pariwisata di Kabupaten Batubara

Medan, Mei 2024

PEMBIMBING


Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, TRI NURANI, NPM. 1803100088, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Mei 2024
Yang Menyatakan



TRI NURANI
NPM. 1803100088

EFEKTIVITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENGELOLAAN OBJEK PARIWISATA DI KABUPATEN BATUBARA

Abstrak

Oleh:

TRI NURANI
NPM. 1803100088

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipatif dalam pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Batubara dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Batubara. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan. Partisipasi yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan memotivasi dan memberikan fasilitator dalam pengembangan objek wisata serta memberikan dinamisator kepada pihak pengembang dan masyarakat disekitar objek wisata. Partisipasi masyarakat merupakan partisipasi yang aktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan, pengawasan dan evaluasi dalam program pengembangan objek wisata Kabupaten Batubara. Selain itu adanya partisipasi masyarakat di bidang sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat di bidang promosi objek wisata, partisipasi pemeliharaan kebersihan objek wisata dan Pemeliharaan Keamanan Dan Kenyamanan bagi pengunjung objek wisata. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan dalam pengelolaan objek wisata masih kurangnya dana yang diperoleh untuk memperbaiki setiap fasilitas-fasilitas yang rusak di Pantai Jono dan tidak adanya kerja sama dengan pemerintah daerah, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap.

Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif, Pengelolaan Objek

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan Syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat serta hidayah yang diberikan Allah Shubhanallah wa Ta'ala kepada setiap makhluk-Nya penulis berhasil melalui tantangan dan hambatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERSEPSI PEMILIH TENTANG CALON ANGGOTA LEGISLATIF DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN LABUHAN BATU”**. Shalawat serta salam senantiasa tersurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi wa Sallam suri tauladan.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda dan Ibunda yang selalu ada setiap saat dari kecil hingga dewasa. Mereka telah memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan dukungan baik moral maupun materiil selama proses penyelesaian skripsi ini.

Saat menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan doa dari berbagai pihak, penulis tidak akan bisa mencapai titik ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin secara khusus menyebutkan beberapa pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang sangat berarti selama penelitian.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof., Dr. Abrar Adhani M.I.Kom. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Yurisna Tanjung M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Akhyar Anshori S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran maupun dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Faizal Hamzah Lubis S.Sos., M.I.Kom Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai biro FISIP UMSU yang telah membantu penulis dalam memenuhi kelengkapan berkas penulis.

Kepada mereka semua penulis tidak bisa memberikan balasan apapun hanya sekedar ucapan terimakasih dan permohonan maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dengan kebaikan pula. Jazakumullahu Khairan penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menantikan kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan kita semua selalu berada dalam lindungan-Nya Aamiin.

Medan, 22 Maret 2024

Tri Nurani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II URAIAN TEORI.....	13
2.1 Kajian Teori	13
1. Efektivitas	13
a. Pengertian Efektivitas	13
b. Aspek-aspek Efektivitas	14
c. Ukuran Efektivitas	14
2. Pengawasan	16
a. Pengertian Pengawasan.....	16
b. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	19
c. Jenis-jenis Pengawasan.....	22
3. Partisipasi	25
a. Pengertian Partisipasi.....	25

b. Bentuk Partisipasi.....	28
4. Pariwisata	29
a. Pengelolaan Kepariwisataaan	29
b. Unsur-Unsur Dalam Pariwisata.....	32
c. Jenis Pariwisata	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Kerangka Konsep	41
3.3 Definisi Konsep	42
3.4 Kategorisasi	43
3.5 Narasumber	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data	44
3.7 Teknik Analisis Data	45
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	46
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Batubara.....	48
4.2 Hasil Penelitian	56
4.3 Pembahasan.....	82
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kategorisasi	43
Tabel 4.1.	Luas Wilayah Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Kecamatan...	49
Tabel 4.2.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 – 2022	50
Tabel 4.3.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara, 2010, 2014, dan 2015	50
Tabel 4.4.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara, 2022	51
Tabel 4.5.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis	
	Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara 2022.	51
Tabel 4.6.	Jenis, Bentuk dan Lokasi Wisata Objek Wisata di Kabupaten Batu Bara	52
Tabel 4.7.	Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2016 di Kabupaten Batu ara	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep	42
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Pengesahan
- Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran III : Surat Pernyataan
- Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran V : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran VI : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
- Lampiran VII : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VIII : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran IX : Pedoman Wawancara
- Lampiran X : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran XI : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran XII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran XIII : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XIV : Surat LoA KESKAP
- Lampiran XV : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

1.6 Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. oleh karena itu sektor pariwisata harus dirawat dan dijaga keberadaannya. Dan sektor pariwisata juga merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Memasuki abad sekarang perhatian terhadap pariwisata sudah sangat meluas, hal ini terjadi karena pariwisata mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat setempat yang menerima kedatangan wisatawan (*tourist reseiving countries*).

Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berfikir maupun sifat perkembangan itu sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah tidak terkecuali di Kabupaten Batubara, yang memiliki potensi alam yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ataupun pengelolaan pariwisata bukan hanya berarti pengarahannya tenaga kerja masyarakat secara sukarela, akan tetapi justru yang lebih penting adalah tergerakannya masyarakat untuk mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan mau memperbaiki kualitas hidupnya. Partisipasi berarti peran serta dalam proses pengelolaan objek wisata baik dalam bentuk kegiatan, serta ikut memanfaatkan objek wisata yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pelaku partisipasi sangat tergantung pada besar dan mutu

peransertanya dalam proses pembangunan tergantung tingkat kemampuan serta kesempatannya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan pengelolaan pariwisata tersebut (Hilyana, 2011:29).

Menurut Undang-Undang No.10/2009 Tentang Kepariwisata dalam sebuah pengelolaan pariwisata perlu direncanakan secara matang dengan memperhatikan segala aspek yang saling mempengaruhi agar tidak terjadi kesalahan yang akan berakibat pada objek wisata tersebut. Apalagi objek wisata tersebut memiliki nilai jual yang sangat berharga baik dari sejarahnya atau pun karena jumlahnya yang terbatas di dunia ini. Hal tersebut dapat dimulai dari potensi yang dimiliki suatu wilayah, adat istiadat, perkembangan ekonomi, sampai aspek politik.

Menurut Isbandi (2017: 27) Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dapat diukur secara nyata dalam aktivitas riil yang merupakan perwujudan program yang telah digariskan didalam kegiatan fisik. Dengan demikian ukurannya adalah bagaimana masyarakat memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan kegiatan. Sumbangan tersebut dapat berupa uang, material (barang) dan juga tenaga. Dan sumbangan tersebut tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan secara ketiga-tiganya.

Mengukur peranserta masyarakat dapat dilakukan dengan mengukur tingkat keterlibatan individu dalam kegiatan bersama yang diukur dengan skala yang dikemukakan oleh Chapin dan Goldhamer (Slamet, 2013:82-89), yaitu:

- a. Keanggotaan dalam organisasi
- b. Kehadiran dalam pertemuan
- c. Membayar iuran/sumbangan
- d. Keanggotaan dalam pengurusan
- e. Kedudukan keanggotaan dalam kepengurusan

Tujuan dari partisipasi masyarakat untuk menghasilkan ide dan persepsi yang berguna untuk masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Santoso, 2015: 4) sebab dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak dari kegiatan, dari cara mengambil keputusan, kebutuhan dari pengharapan kelompok masyarakat, dan kelompok masyarakat itu menuangkannya dalam suatu konsep. Reaksi dari pandangan masyarakat saja akan membantu masyarakat itu sendiri dalam hal pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas, arah dan kepentingan yang positif dari berbagai faktor.

Kabupaten Batu Bara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Asahan. Proses pemekaran Kabupaten Batu Bara tidak semudah pemekaran daerah lain. Dinamika politik dan kepentingan banyak pihak, menyebabkan pemekaran ini membutuhkan waktu yang cukup panjang yang rancangan Undang-Undang pembentukanya disetujui oleh DPR RI pada tanggal 8 Desember 2006 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007. Pada tanggal 15 Juni 2007 baru diresmikan dengan ibukota Kabupaten di Kecamatan Lima Puluh. Pemekaran Kabupaten Batu

Bara merupakan cita-cita luhur masyarakat Batu Bara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batu Bara. Bapak H. Sofyan Nasution, SH,MM adalah Pj. Bupati Batu Bara I (2006- 2007) dan setelah itu digantikan dengan Bapak Drs. Syaiful Syafri, MM. Pj Batu Bara II (2007- 2008). Pada tahun 2008 berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2008 Bagian pesisir timur kabupaten Batu Bara duhulunya kurang berkembang. Kehidupan ekonomi pesisir pantai Batu Bara kebanyakan nelayan yang sehari-harinya menangkap ikan di laut. Namun sejak pemekaran banyak pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara. Banyak tempat wisata yang di buka terutama wisata bahari dikarenakan memenuhi syarat wisata. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009, tentang kepariwisataan. Pasal 1 yaitu : destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Tempat-tempat wisata yang terdapat di pesisir seperti Pantai Sejarah, Pantai Bogak, Pantai Bunga, Pantai Perjuangan/Jono, Pantai Datuk, Pantai Beting, Pulau Salah Nama, dan Pulau Pandang.

Perkembangnya wisata bahari maka semakin menunjang perekonomian masyarakat pesisir Batu Bara dikarenakan banyak yang berkunjung ke tempat wisata. Tempat-tempat wisata ramai dikunjungi oleh para wisatawan pada saat hari libur seperti : libur idul fitri, tahun baru, dan hari libur lainnya. Disaat hari libur pengunjung diperkirakan mencapai ribuan orang. Wisatawan yang datang tidak hanya dari Batu Bara namun juga dari luar kota Batu Bara bahkan wisata asing.

Pembangunan Ekonomi maritim dipandang sangat penting karena pembangunan ekonomi maritim meliputi beberapa sektor dan aspek yang sangat vital bagi pembangunan ekonomi regional. Wilayah pesisir merupakan pusat berbagai macam kegiatan pembangunan di Indonesia. Aktifitas perekonomian yang dilakukan dikawasan pesisir diantaranya adalah kegiatan perikanan, industri dan pariwisata. Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja.

Kabupaten Batu Bara merupakan tempat pengembangan ekonomi yang sangat berpotensi. Proyek pengembangan industri pelabuhan Kuala Tanjung yang merupakan program Masterplan Percepatan Pembangunan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yakni Kuala Tanjung, sebagai pelabuhan internasional. Sebelum pemekaran Kabupaten Batu Bara, ekonomi para nelayan baik yang menetap atau hanya sambilan saja hanya cukup untuk makan sehari-hari saja.

Sejumlah obyek wisata yang dimiliki antara lain : Pulau Pandang, Pulau Salah Nama, Pantai Perjuangan, Pantai Bunga, Pantai Bunga Laut Indah, Pantai Alam Datuk, Pantai Kubah Padang, Waduk Indah, Istana Niat Lima Laras, Pantai Sejarah, Kubah Datuk Batubara, Danau Laut Tador, dan sejumlah benda peninggalan sejarah budaya masih banyak ditemukan di Kabupaten Batubara. Beberapa obyek wisata tersebut dikelola pemerintah daerah sebagai tempat rekreasi yang dapat dikunjungi oleh penduduk setempat ataupun dari luar kota, serta wisatawan dari mancanegara (pariwisatabatubara.com/ diakses tanggal 7 juni 2023).

Kecamatan Tanjung Tiram yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Batubara memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan menjadi

suatu tempat wisata, serta menjadi salah satu andalan guna pemasukan pendapatan asli daerah. Ada berbagai jenis obyek wisata yang bisa ditemukan di kecamatan ini antara lain Istana Niat Lima Laras dan pulau-pulau kecil yaitu Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang. Pulau Salah Nama merupakan obyek wisata yang berada di di Selat Malaka dengan luas kurang lebih 13 ha, akan tetapi ia masuk kedalam wilayah Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara sebagai salah satu pulau terluar di Indonesia dengan jarak kurang lebih 13 mil dari pelabuhan Kecamatan Tanjung Tiram. Obyek wisata ini memiliki keindahan alam yang sangat menarik dan masih sangat asri yang suasananya tenang dan jauh dari keriuhan, dengan panjang garis pantai 18 meter, memiliki pasir pantai yang putih, air laut yang jernih di pinggir pulau yang memperlihatkan keindahan dasar lautnya, terdapat sumur air tawar di tengah pulau, banyak batu-batuan besar dan terjal di pinggir pulau. Di Pulau Salah Nama ini wisatawan juga dapat melakukan berbagai macam aktifitas yang menyenangkan diantaranya memancing, tracking mengelilingi pulau, surfing, snorkeling, berenang dan menyelam di pinggir pulau untuk melihat keindahan flora dan fauna di dasar laut.

Selain potensi besar yang dimiliki Pulau Salah Nama tersebut terdapat permasalahan sarana dan prasarana (penginapan, rumah makan, transportasi, We umum, promosi, dermaga, tempat sampah, jaringan listrik, penyedia air bersih, jaringan telekomunikasi, dan layanan kesehatan) yang kurang mendukung misalnya aksesibilitas yang kurang mendukung dan sangat minim menuju lokasi yang cukup jauh. Dimana perjalanan dari dermaga Tanjung Tiram menuju Pulau Salah Nama memakan waktu 45 menit dengan menggunakan speedboat sederhana yang berkapasitas 15 orang penumpang dengan biaya yang lebih mahal lebih kurang

Rp.200.000,-/orang dan menggunakan kapal-kapal nelayan memakan waktu 2 jam yang memiliki kapasitas 10 sampai 35 orang penumpang dengan biaya lebih kurang Rp.100.000,-/orang. Selain itu, dermaga yang digunakan memiliki panjang lebih kurang 8 meter dan hanya dapat digunakan pada saat air laut pasang saja. Banyak faktor penghambat dalam pengembangan obyek wisata ini dan masih kurangnya upaya yang dilakukan pemerintah. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat sekitar yang perlu diatasi demi perkembangan obyek wisata ini.

Pemerintah kabupaten khususnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melakukan berbagai pembangunan sarana dan prasarana, fasilitas dan penataan daerah objek wisata. Menurut Bagiyono dalam bukunya *Pariwisata dan Perhotelan* (Bagiyono, 2017) mengatakan bahwa “Organisasi kepariwisataan juga bertugas dalam melaksanakan pengawasan dan memberi arah dalam pengembangan sektor kepariwisataan”. Organisasi yang dimaksud adalah suatu instansi untuk mengelola objek wisata. Kabupaten Batu Bara mempunyai objek wisata yang menarik dan sudah banyak dikenal oleh wisatawan mancanegara maupun wisata domestik. Objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Batu Bara diantaranya adalah: Danau Laut Tador; Pantai Bunga; Pantai Jono; Pantai Datuk; Pulau Salah Namu; Pulau Pandang; Kampung Songket; Istana Niat Lima Laras; Singapore Land Waterpark; Pantai Citra; Pantai Kuala Indah; Kampung Jepang.

Adapun jenis-jenis usaha wisata yang ada di Kabupaten Batu Bara adalah Objek Wisata; Kawasan Wisata; Akomodasi (Hotel); Transportasi; Usaha Makanan dan Minuman; Cafeteria; Jasa Pramuwisata, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara dan taraf hidup masyarakat

yang berada terutama yang berada disekitar objek wisata. Dalam mengelola potensi pariwisata maka pemerintah Kabupaten Batu Bara melakukan berbagai upaya agar pariwisata di Kabupaten Batu Bara semakin diminati oleh wisatawan. Kabupaten Batu Bara dengan potensi berbagai objek wisata yang sangat prospektif untuk terus dikembangkan.

Pengelola objek wisata tersebut maka diperlukan unsur profesionalisme yang harus dimiliki oleh lembaga, instansi atau dinas yang berkompeten dibidangnya. Dalam hal ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata,

Dalam pengembangan wisata, masyarakat turut serta dalam pengelolaan wisata tersebut. Seperti yang ada di Tanjung Tiram saat ini pengelolaan dalam BUMDes desa wisata ini melibatkan masyarakat, sehingga pemerintah desa hanya mengarahkan dan memfasilitasi saja.

Namun yang terlihat walaupun pemerintah berusaha melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata tersebut masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya terlibat dalam setiap proses kegiatan yang di rencanakan/di programkan pemerintah desa. Salah satu contohnya ketika pemerintah Batubara membuat rencana untuk membangun taman-taman kecil disetiap persimpangan jalan, dan mengharapkan masyarakatlah yang berperan sepenuhnya disini, tapi yang terlihat masih banyak masyarakat yang belum ikut serta dalam kegiatan tersebut kalaupun ikut hanya sebatas datang.

Dalam pengembangan Desa Wisata setidaknya ada tiga aktor yang berperan penting yaitu wisatawan, penduduk setempat dan bisnis pariwisata atau perantara. Ketiga aktor tersebut harus melebur secara utuh untuk mewujudkan industri pariwisata yang dapat menguntungkan semua pihak. Wisatawan merupakan aktor

penentu, karena aktifitas desa wisata muncul karena adanya perubahan selera wisatawan dalam memandang daerah tujuan wisata. Sedangkan penduduk setempat adalah mereka yang terkena dampak dari kunjungan wisatawan, yang mempersiapkan apa yang dibutuhkan wisatawan. Untuk bisnis pariwisata adalah mereka yang mempromosikan daerah tujuan wisata kepada wisatawan sehingga merupakan aktor yang mencari keuntungan dari wisatawan dan memberikan keuntungan bagi penduduk setempat, (Probaningrum 2016).

Ada beberapa reaksi yang muncul terhadap pengembangan wisata. Ketika pengembangan desa wisata di galakkan di pesisir Batubara, berbagai reaksi muncul dari masyarakat, ada yang setuju ada pula yang tidak setuju dengan di kembangkannya desa tersebut menjadi desa wisata. Permasalahan lain yang berkaitan dengan pengembangan wisata di Batubara dengan belum optimalnya kelembagaan masyarakat terkait dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam pengembangan desa wisata. Belum meratanya penguatan sadar wisata terkait dengan upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata menyebabkan rendahnya pemahaman akan manfaat pengembangan desa wisata. Pemahaman desa wisata berbasis masyarakat akan mempengaruhi sikap mereka menerima atau menolak konsep desa wisata. Sebagai komponen utama dalam pengembangan Wisata berbasis masyarakat, warga lokal mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata. Tapi ironis ketika masyarakat lokal hanya berperan sebagai objek atau penonton yang tidak ikut terlibat atas pengelolaan pariwisata ditanahnya sendiri, atau terlibat ketika pelaksanaan kegiatan saja sementara pada saat perencanaan, masyarakat belum sepenuhnya terlibat. Padahal pemerintah pun mengharapkan

masyarakatlah yang membuat ide-ide yang cocok untuk proses pengembangan wisata. Disamping sebagai pengelola BUMDes masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata diantaranya sebagai pemandu wisata, penyedia jasa penyebrangan menggunakan perahu, dan juga mendirikan warung-warung yang menyediakan berbagai makanan khas Bautubara. Namun yang terjadi bukannya masyarakat lokal yang berperan disitu malah para pelaku usaha yang datang dari luar desa tersebut yang lebih banyak berperan dalam hal tersebut. Adanya berbagai aktifitas masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan wisata dan penulis melihat pengawaan serta partisipasi masyarakat masih kurang aktif dalam keterlibatan dalam berpartisipasi dilihat dari kurang terlibatnya masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata di pesisir batubara.

Hasil penelitian (Amiruddin, 2022) menemukan bahwa pengelolaan pariwisata melalui pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dilakukan melalui partisipasi dalam pengelolaan kelembagaan, partisipasi dalam pengelolaan daya dukung sarana, partisipasi dalam pengelolaan pemasaran, dan partisipasi dalam inovasi promosi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Batubara”

1.7 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diambil dalam penelitian ini, maka rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana Pengawasan Partisipatif dalam Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Batubara?.”

2. Apa faktor yang menghambat dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Batubara?

1.8 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan Partisipatif dalam pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Batubara.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Batubara

1.9 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis studi dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sosial khususnya program studi ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktisi

Memberikan bahan masukan bagi instansi-instansi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam memahami pengelolaan objek kawasan pariwisata dan sebagai bahan masukan bagi pihak peneliti lain yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.10 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS : Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini juga boleh mengajukan lebih dari satu teori dan data untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN : Pada bab ini dijelaskan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan atau Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian dan Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Pada bab ini berisi hasil penelitian dan tentang pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, sedangkan pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

URAIAN TEORI

2.1 Kajian Teori

5. Efektivitas

d. Pengertian Efektivitas

Menurut (Siagian, 2016) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektifitasnya. Berpendapat efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Menurut (Rosalina, 2012) Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan

prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

e. Aspek-aspek Efektivitas

Menurut (Egerton, 2015) Efektifitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1) Aspek tugas atau fungsi

Yaitu lembaga yang dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.

2) Aspek rencan atau program

Adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.

3) Aspek ketentuan dan peraturan

Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya.

4) Aspek tujuan atau kondisi ideal

Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan dan kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penelitian ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai.

f. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut (Rosalina, 2012) riteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

6. Pengawasan

d. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwatugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian,2003:112).

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2002:81).

Menurut (Siagian, 2016) pengawasan adalah merupakan langkah seklaigus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal yang tercantum dalam melaksanakan dengan baik atau tidak. Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya parapengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tertsebut.

Siagian (2003:112) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan

sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan.

Sedangkan indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniuatau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
- b. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilaikesetiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya beik atau jelek.
- c. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu ,memberikan sanksi kepada bawahan (Kartono, 2002:153)

Karena itu pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. (Fattah, 2004:102). Menurut (Kansil, 2002:12) pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

- a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi:

- a. Pengawasan Umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum ialah menteri dalam negeri, kepala wilayah yaitu gubernur, bupati, walikota, kepala daerah sebagai pemerintah daerah.
- b. Pengawasan Prevektif. Dimna mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlalu sesudah mendapat pengawasan.
- c. Pengawasan Refresif. Menyangkut penangguhan atau pembatasan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundangan yang tingkatnya lebih tinggi.

e. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (2001:22) maksud pengawasan adalah untuk :

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam refncana terarah kepada sarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning

Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 2001:22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- 2) Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- 4) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas (2004:337) mengemukakan:

- 1) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
- 2) Memberi kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
- 3) Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Situmorang dan Juhir (2001:26) mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk:

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam Safrudin, 2002:36) adalah: untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-

kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

- 1) Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah di buat.
- 2) Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.

f. Jenis-jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian ada dua yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

- 1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung.
- 2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan (Siagian:115)

Jenis-jenis Pengawasan menurut Daly Erni (2008:23)

- 1) Pengawasan intern dan ekstern
 - a) Pengawasan intern. Pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat

- b) pengawasan ekstern. Pengawasan yang dilakukan di luar badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 Pasal 23E. “ Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri
- 2) Pengawasan Preventive dan Refresif
 - a) Pengawasan Preventif : sebelum kegiatan dilaksanakan
 - b) Pengawasan Refresif : setelah kegiatan dilaksanakan
 - 3) Pengawasan Aktif dan Pasif
 - a) Pengawasan aktif (dekat)

Merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan
 - b) Pengawasan Pasif

Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
 - 4) Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran.
 - a) Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.
 - b) Pengawasan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. \

Nanang Fattah mengatakan pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan korektif sebagai hal akhir proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima (Fattah, 2004:102). Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan pimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan tugas, sebab suatu tujuan organisasi tidak akan tercapai secara optimal apabila tidak dilakukan dengan pengawasan kinerja para pegawai.

Nanang Fattah (2004:106) mengatakan ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan agar pengawasan ini dapat berfungsi efektif antara lain :

- 1) Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan
- 2) Standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan, ada dua tujuan pokok yaitu : untuk memotivasi dan untuk dijadikan patokan guna membandingkan dengan prestasi, artinya jika pengawasan ini efektif dan dapat memotivasi seluruh anggota untuk mencapai prestasi tinggi.
- 3) Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi.
- 4) Banyaknya pengawasan harus dibatasi, artinya jika pengawasan terhadap bawahan terlampau sering, ada kecenderungan mereka kehilangan otonomnya dan dapat dipersepsi pengawasan penyelewengan.

- 5) Sistem pengawasan harus dikemudi tanpa mengorbankan otonom dan kehormatan pimpinan tetapi fleksibel, artinya sistem pengawasan menunjukkan kapan, dan dimana tindakan koreksi harus diambil.
- 6) Pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan artinya tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar tetapi pada penyediaan perbaikan, menentukan tindakan perbaikan.
- 7) Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan masalah.

Yaitu menemukan penyebab, membuat rancangan pengulangan, melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan, mencegah masalah serupa.

7. Partisipasi

c. Pengertian Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2014: 419). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2016: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam

pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

d. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 58), terbagi atas:

1) Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

2) Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011: 58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Partisipasi fisik

Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.

2) Partisipasi non fisik

Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo

masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

8. Pariwisata

d. Pengelolaan Kepariwisataan

Menurut Andi Mappi Sammeng (2011: 261) ada tiga faktor penting dalam melakukan pengelolaan kepariwisataan yaitu pengembangan, pengaturan dan kelembagaan.

1. Pengembangan

Untuk melakukan pengembangan kepariwisataan hal yang harus diperhatikan adalah

1) Perencanaan

Perencanaan pariwisata merupakan pengorganisasian secara menyeluruh pengembangan atau pembangunan fasilitas-fasilitas pariwisata. Salah satu cara untuk mewujudkan pengembangan yang berkesinambungan adalah melalui pendekatan perencanaan pelestarian lingkungan. Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sesuai pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum (Syaiful Bahri Rruray, 2012 : 109).

a) Penyusunan rencana

Pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat harus memperhatikan sengan sungguh-sungguh empat pertimbangan utama yaitu ;

- 1) Aksesibilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keandalan
- 2) Pelestarian lingkungan isu pokok otensitas dan keramahan
- 3) Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis
- 4) Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan dan metode

Untuk menghadapi isu pokok sebagai mana yang dikemukakan diatas perlu disiapkan berbagai respon startegis antara lian;

- 1) Jalur-jalur trnasportasi dan terminalnya
- 2) Keramah tamahan pelayanan
- 3) Penggarapan pasar wisata tertentu
- 4) Penonjolan penyajian warisan budaya local
- 5) Siversifikasi dan pengendalian produk
- 6) Investasi dan penyerapan tenaga kerja local
- 7) Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan

- b) Daya dukung. Konsep daya dukung dalam proses penyusunan rencana ada dua faktor yang mendapat perhatian yaitu citra (produk wisata) dan lingkungan khas (alam dan sosial budaya). Kedua factor tersebut dapat lebih diperjelas dengan kriteria dari segi fisik, sosail budaya, ekonomi dan prasarana.
- c) Jangka waktu. Rencana jangka pendek biasanya berisikan program pelaksanaan untuk kurun waktu 5 tahun. Jadi program jangka pendek merupakan salah satu penggalan pelaksanaan dari rencana jangka panjang. Jangka waktu : pendek, menengah, panjang.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan suatu rencana melibatkan semua pihak (pemerintah atau swasta). Adapun unsur-unsur pokok pelaksanaan suatu rencana pengembangan pariwisata meliputi :Pengesahan rencana, terdiri dari sasaran, tujuan, kebijakan umum dan Pentahapan program (pengembangan) terdiri dari fasilitas, sarana- prasarana, koordinasi dan kerjasama

3. Pembiayaan,

Sumber pembiayaan. Biaya pengembangan pariwisata disuatu Negara/ daerah dapat dikelompokan kedalam empat golongan besar, yaitu biaya persiapan (pemerintah, swasta, kerjasama). Pembangunan prasarana (objek wisata, daya tarik wisata). Pembagunan sarana/usaha (pajak) biaya pemantauan.

4. Pengendalian

Perkembangan pelaksanaan program khususnya program kerja atau target tahunan harus dipantau secara berkesinambungan. Pengendalian berupa pelayanan dan tanggung jawab tenaga kerja, kegiatan, pelaksanaan pengawasan proyek yang dilaksanakan, prasarana (aksesibilitas dan transportasi) serta pengendalian pemasaran, jumlah kedatangan wisatawan perbulan, tingkat kepuasan masyarakat dan Efektivitas kegiatan promosi yang dilakukan.

e. Unsur-Unsur Dalam Pariwisata

Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri pariwisata adalah : *travel agent* atau *tour operator*, perusahaan pengangkutan, akomodasi perhotelan, bar dan restoran, *travel agent local*, souvenirshop, perusahaan-perusahaan yang akan berkaitan dengan aktivitas wisatawan seperti tempat menjual dan mencetak film, kamera, kartu pos, penukaran uang, bank dan lain-lain. Menurut (Yoeti, 2017). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Jakarta : PT. Paramita

Unsur-unsur dalam pariwisata terdiri dari:

- 1) Politik pemerintahan, merupakan sikap pemerintah terhadap kepariwisataan yang ada. Politik pemerintahan dapat bersifat secara langsung, yaitu sikap pemerintah terhadap wisatawan yang datang ke daerah wisata dan tak langsung yaitu kondisi kestabilan politik, ekonomi, dan keamanan daerah bersangkutan.

- 2) Kesempatan berbelanja, tersedianya tempat belanja yang dibutuhkan wisatawan juga barang-barang khas tempat wisata.
- 3) Promosi, adalah propaganda kepariwisataan dengan didasarkan atas rencana atau propaganda secara teratur dan kontinu ke dalam negeri maupun ke luar negeri.
- 4) Harga, yaitu harga barang-barang, sarana dan prasarana yang ada. Pada intinya wisatawan sama seperti konsumen pada umumnya yang menginginkan harga murah dengan kualitas yang baik.
- 5) Pengangkutan, meliputi: keadaan jalan, alat angkut, dan kelancaran transportasi di tempat wisata
- 6) Akomodasi, merupakan rumah sementara bagi wisatawan. Hal yang penting diperhatikan dari akomodasi adalah: kenyamanan, pelayanan yang baik dan kebersihan sanitasinya.
- 7) Atraksi, adalah segala pertunjukan yang mempunyai nilai manfaat untuk dilihat atau diperhatikan termasuk objek wisata itu sendiri.
- 8) Jarak dan waktu, berkaitan dengan lamanya waktu yang harus dikorbankan wisatawan untuk mencapai tempat wisata. Semakin cepat mencapainya semakin baik.
- 9) Sifat ramah tamah, wisatawan sangat menyenangi keramahan dari penduduk yang ada di tempat wisata tersebut.

Komponen atau unsur-unsur pariwisata meliputi:

- 1) Atraksi,

Atraksi adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang ingin berkunjung ke suatu tempat

daerah tujuan wisata. Atraksi meliputi benda yang tersedia di alam, hasil ciptaan manusia (kebudayaan) dan tata cara hidup dalam masyarakat.

Adapun jenis-jenis atraksi wisata diantaranya:

- a) Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, meliputi
 - (1) Iklim, misalnya cuaca cerah, banyak cahaya matahari, sejuk, kering, panas, hujan dan sebagainya
 - (2) Bentuk tanah dan pemandangan
 - (3) Hutan belukar misalnya hutan yang luas, banyak pohon-pohon
 - (4) Fauna dan flora, seperti tanaman-tanaman yang aneh, burung-burung, ikan, binatang buas, cagar alam, daerah perburuan dan sebagainya
 - b) Pusat-pusat kesehatan dan termasuk dalam kelompok ini misalnya sumber air mineral, mandi lumpur, sumber air panas, dimana kesemuanya itu diharapkan dapat menyembuhkan macam-macam penyakit.
 - c) Hasil ciptaan manusia, dibagi menjadi empat bagian penting yaitu benda-benda yang bersejarah dan kebudayaan dan keagamaan.
 - d) Tata cara hidup masyarakat berupa tata cara hidup tradisional dari suatu masyarakat merupakan salah satu sumber yang amat penting untuk ditawarkan kepada wisatawan. Bagaimana kebiasaan hidupnya, adat istiadatnya semuanya merupakan daya tarik bagi wisatawan.
- 2) Aksesibilitas,
- Aksesibilitas adalah kemudahan dalam mencapai daerah tujuan wisata

baik secara jarak geografis atau kecepatan teknis serta tersedianya sarana transportasi ke tempat tujuan. Beberapa hal yang mempengaruhi aksesibilitas suatu tempat adalah kondisi jalan, tariff angkutan jenis kendaraan, jaringan transportasi, jarak tempuh dan waktu tempuh. Semakin baik aksesibilitas suatu obyek wisata wisatawan yang berkunjung dapat semakin banyak jumlahnya. Sebaliknya jika aksesibilitasnya kurang baik, wisatawan akan merasakan hambatan dalam kunjungan yang dilakukannya dalam berwisata.

3) Fasilitas

Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Kebutuhan seperti prasarana perekonomian (pengangkutan, prasarana komunikasi, kelompok, sistem perbankan) dan prasarana sosial (sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, Faktor keamanan, dan pelayanan petugas). Sarana prasarana sebagai berikut:

a) Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam.

Pariwisata dapat berupa:

- (1) Prasarana umum, jalan, air bersih, terminal, lapangan udara, komunikasi dan listrik
- (2) Prasarana yang menyangkut ketertiban dan keamanan agar terpenuhi dengan baik

- b) Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan. Sarana dapat berupa:
- 1) Sarana pokok, perusahaan yang hidup dan kehidupannya tergantung pada kedatangan wisatawan, termasuk travel agen, transportasi, akomodasi dan restoran.
 - 2) Sarana pelengkap, perusahaan yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok saja, tetapi agar wisatawan bias tinggal lebih lama
 - 3) Sarana penunjang, perusahaan yang menunjang sarana lengkap dan sarana pokok serta berfungsi agar wisatawan bias tinggal lebih lama dan lebih banyak mengeluarkan uangnya di obyek wisata.

Berdasarkan teori di atas unsur-unsur pariwisata dibagi tiga bagian dalam atraksi (benda yang tersedia di alam, hasil ciptaan manusia dan tata cara hidup dalam masyarakat), aksesibilitas (pengangkutan, akomodasi, jarak dan waktu,) dan fasilitas (politik pemerintahan, kesempatan berbelanja, promosi, harga, dan sifat ramah tamah).

f. Jenis Pariwisata

Menurut (Pendit, 2012)

Pariwisata dapat dikelompokkan menurut objek yang menjadi daya tariknya, yaitu:

- 1) Pariwisata budaya, pariwisata yang didasari rasa ingin tahu wisatawan akan budaya lain, kebiasaan yang dilakukan, kepercayaan serta atraksi budaya lain.
- 2) Pariwisata kesehatan, adalah suatu kegiatan wisata yang dilakukan untuk penyegaran jasmani maupun rohani, seperti berkunjung ke tempat pemandian air panas.
- 3) Pariwisata olahraga, pariwisata yang dilakukan dalam rangka olahraga, seperti bepergian dalam rangka perwakilan negara dalam pertandingan olahraga antarnegara.
- 4) Pariwisata komersial, pariwisata yang dikomersilkan. Dapat berupa pameran-pameran
- 5) Pariwisata industri, erat kaitannya dengan pariwisata komersil, hanya saja objek yang dituju berupa lingkungan industri.
- 6) Pariwisata politik, pariwisata yang berkenaan dengan kegiatan politik suatu negara.
- 7) Pariwisata konvensi, pariwisata yang menyediakan fasilitas tempat pertemuanpertemuan atau acara antar negara.
- 8) Pariwisata sosial, adalah kegiatan wisata yang diperuntukkan bagi kelas menengah ke bawah. Kegiatan wisata ini biasanya disponsori oleh lembagalembaga tertentu.
- 9) Pariwisata pertanian, adalah pariwisata yang memanfaatkan kegiatan pertanian (agriculture) dan produknya.
- 10) Pariwisata maritim, kegiatan wisata yang memanfaatkan pesona alam laut.

- 11) Pariwisata cagar alam, adalah kegiatan wisata dengan bepergian ke tempat cagar alam.
- 12) Pariwisata buru, adalah pariwisata yang menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan berburu.
- 13) Pariwisata bulan madu, pariwisata yang diperuntukkan bagi pasangan yang melakukan perjalanan bulan madu.
- 14) Pariwisata petualangan, adalah kegiatan berwisata ke tempat-tempat yang tidak lazim dikunjungi orang. Fasilitas yang ada sangat minim atau tidak ada. Semuanya sangat bersifat alami.
- 15) Pariwisata pilgrim, adalah pariwisata yang diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan. Jenis pariwisata menurut bahwa pariwisata jenisnya bermacam-macam, masing-masing punya kekuatan dan kelemahan serta daya saingnya sendiri-sendiri. Jenis pariwisata itu antara lain wisata alam (panorama), wisata belanja, wisata sejarah, wisata budaya, wisata olah raga (surfing, mountainering, bungy jumping, gantole, olah raga air/sky dan air/layar, jetski dan lain-lain), wisata fauna (kebun binatang, taman safari, taman reptil dan taman burung), agro wisata dan atau gabungan diantara dua atau lebih dari jenis wisata tersebut.

Menurut (Pamayun, 2014) Jenis pariwisata dibagi menjadi enam yaitu:

- 1) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru,

untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang, untuk menikmati keindahan alam, dan lain-lain.

2) Pariwisata untuk rekreasi

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendakai pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan dan kelelahannya.

3) Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultur Tourism*)

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat-istiadat, cara hidup rakyat, dan lain-lain.

4) Pariwisata untuk olah raga (*Sport Tourism*), dibagi menjadi:

a) Big sport events, yaitu peristiwa-peristiwa olah raga besar seperti olimpiade game, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain.

b) Sporting tourism of the practitioners, yaitu pariwisata olah raga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempratikan sendiri, seperti pendakian gunung, rafting, berburu, dan lain-lain.

5) Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Business Tourism*) Jenis

pariwisata ini seperti industri pariwisata, tetapi juga mencakup semua kunjungan ke pameran, kunjungan ke instalasi teknis yang bahkan menarik orang- orang luar profesi ini.

6) Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*) Peranan jenis

wisata ini makin lama makin penting. Konfensi dan pertemuan bentuk

ini sering dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal di beberapa kota atau negara penyelenggara

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa jenis-jenis pariwisata meliputi pariwisata budaya, kesehatan, olahraga, komersial, industry, politik, konvensi, social, pertanian, maritime, cagar alam, buru, bulan madu, pengetahuan dan pilgrim.

BAB III

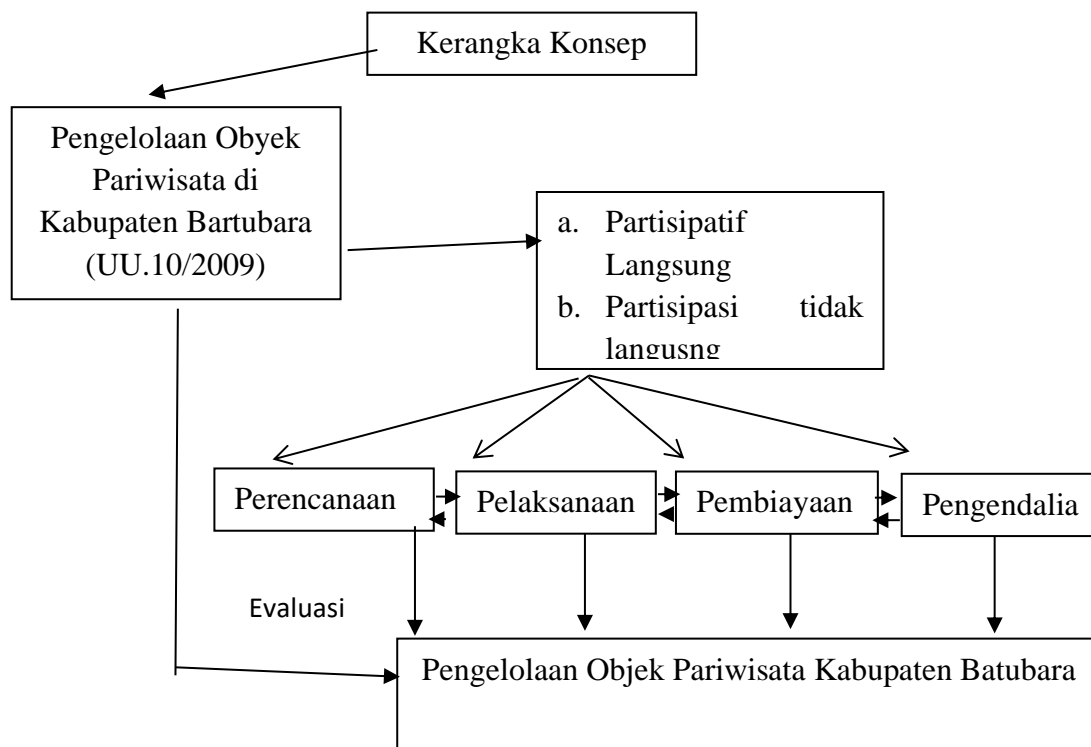
METODE PENELITIAN

3.10 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:15) bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci. Sementara menurut Nawawi dan Martini dalam Sugiyono (2015:16) mendefinisikan metode kualitatif deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Dimana penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran serta respon masyarakat terhadap partisipasi dalam mengelola objek wisata di Kabupaten Batubara.

3.11 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah merupakan formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

3.12 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan dan kelompok. Diharapkan peneliti mampu memformulasikan pemikirannya ke dalam konsep secara jelas dalam kaitannya dengan penyederhanaan beberapa masalah yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun yang menjadi definisi konsep adalah :

- a. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output).

- b. Pengawasan adalah merupakan langkah seklaigus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal yang tercantum dalam melaksanakan dengan baik atau tidak.
- c. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan
- d. Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

3.13 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian untuk mendukung analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu :

Tabel 3.1 Kategorisasi

Kategorisasi	Indikator
Pengawasan Partisipatif	Indikator pengawasan menurut Kartono, (2002: 153) 1. Menentukan ukuran pelaksanaan 2. Memberikan penilaian. 3. Mengadakan korektif
Pengelolaan Objek Wisata	Komponen dari unsur-unsur partisipasi menurut (Yoeti, 2017) 1. Adanya atraksi 2. Adanya aksesibilitas 3. Adanya Fasilitas

3.14 Narasumber

Informan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Sekitar Objek Wisata Kabupaten Batubara, pengusaha di sekitar Objek Wisata, Dinas Pariwisata Batubara serta Informan tambahan adalah orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam persoalan penelitian, namun mengetahui masalah yang diteliti.

3.15 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan informasi. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer. Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut:
 - a. Wawancara. Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan yang telah dijadikan sumber data. Sehingga akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.
 - b. Observasi. Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang terjadi di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunde dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut:
 - a. Studi Kepustakaan. Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkompetensi, serta memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
 - b. Studi Dokumentasi. Yaitu dengan memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, maupun foto-foto yang dilakukan penulis untuk mendukung data penelitian ini.

3.16 Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif deskriptif , yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelola, menyajikan dan menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan kemudian dikumpulkan, serta diolah dan dianalisa dengan menggunakan tabel tunggal, sehingga dapat dibaca dengan mudah untuk mengetahui jawaban yang diteliti. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) menyatakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif deskriptif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. Dengan proses kerja analisis tiga jalur yaitu:

- a. Mereduksi data, merupakan proses pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data besar dari kegiatan penelitian. Reduksi data dapat menggunakan bentuk singkatan coding, perumusan tema, serta membuat batasan persoalan.

- b. Menyajikan data, merupakan suatu informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Metode data yang digunakan dalam penyajian data adalah metode deskriptif. Dalam tahap ini, hasil penelitian perlu dipadukan dengan teori yang digunakan dalam penelitian yang digunakan.
- c. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan mengumpulkan seluruh hasil pengolahan data yang telah dilakukan.

Dimana ketiganya dilaksanakan bersamaan sebagai sesuatu yang terkait dan interaktif pada saat, selama, dan sesudah pengumpulan informasi dan data. Untuk teknik pengecekan validitas data menggunakan triangulasi.

3.17 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu wilayah objek wisata di Kabupaten Batubara. Waktu penelitian berlangsung selama bulan Desember sampai dengan selesai.

3.18 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Kabupaten Batubara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Sumatera Utara dengan luas sekitar 922,2 km². Astronomis Kabupaten Batubara terletak pada 2° 46' LU - 3° 26' LU dan 99° 05' BT - 99° 39' BT. Secara Geografis Kabupaten Batubara berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Timur : Selat Malaka dan Kabupaten Asahan

Sebelah Selatan : Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun

Sebelah Barat : Kabupaten Serdang Bedagai

Kabupaten Batubara terletak di sebelah utara Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Kabupaten Batubara memiliki 7 Kecamatan, yaitu

Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Talawi, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Sei Balai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Batubara

4.1.1 Letak dan Geografis

Kabupaten Batu Bara yang dimekarkan menjadi wilayah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Asahan dan Batu Bara. Wilayah Asahan terdiri dari atas 13 Kecamatan sedangkan Batu Bara 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Talawi, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Medang Deras. Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2007 ditetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Batu Bara adalah tanggal 8 Desember 2006 sesuai dengan Persetujuan Bersama DPR RI yang memutuskan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara.

Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang baru terbentuk pada tahun 2007 berdasarkan pemekaran dari Kabupaten Asahan. Kabupaten Batu Bara berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Kabupaten Batu Bara menempati area seluas 904,96 km² atau 90.496 Ha yang terdiri 7 kecamatan serta 151 desa/kelurahan defenitif. Letak geografis Kabupaten Batu Bara berada di 2°03'00" – 3°26'00" Lintang Utara dan 99001-100'00" Bujur Timur. Adapun batas administrasi Kabupaten Batu Bara yaitu :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Serdang Bedagai
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Asahan
3. Sebelah Barat : Kabupaten Simalungun
4. Sebelah Timur : Selat Malaka

Ibukota Kabupaten Batu Bara terletak di Kecamatan Lima Puluh. Berdasarkan daerah menurut kecamatan, daerah Lima Puluh merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 239,55 km² atau 26,47% dari luas total Kabupaten Batu Bara. Sedangkan Kecamatan Medang Deras merupakan wilayah terkecil dengan luas 65,47 km² atau 7,23% dari luas total Kabupaten Batu Bara.

Tabel 4.1.
Luas Wilayah Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah	
			Desa	Kelurahan
1	Sei Balai	92.64	14	-
2	Tanung Tiram	173.79	20	2
3	Talawi	89.80	19	1
4	Lima Puluh	239.55	34	1
5	Air Putih	72.24	17	2
6	Sei Suka	171.47	19	1
7	Medang Deras	65.47	18	3
Jumlah		904.96	141	10

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batu Bara, 2023

4.1.2 Demografis

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan peningkatan, pada tahun 2017 berjumlah 379.400 jiwa dan pada tahun 2022 menjadi 400.803 jiwa. Jumlah penduduk pada tahun 2023 terbesar berada di Kecamatan Lima Puluh, yaitu sebanyak 89.864 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Sei Balai, yaitu sebanyak 27.827 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Batu Bara di tahun 2017-

2022 sebesar 1,14 % per tahun di setiap kecamatan. Pertumbuhan penduduk tersebut diambil berdasarkan pertumbuhan kabupaten bukan rata-rata laju pertumbuhan kecamatan, dikarenakan ada perkembangan laju jumlah penduduk kecamatan yang mengalami penurunan atau minus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Batu Bara
Tahun 2017 – 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sei Balai	26.857	26.914	27.073	27.211	27.609	27.827
Tanjung Tiram	62.964	63.728	63.996	64.321	66.749	67.492
Talawi	53.585	54.185	54.445	54.722	57.128	57.860
Lima Puluh	85.164	85.811	86.079	86.517	89.033	89.864
Air Putih	46.749	47.017	47.171	47.411	49.217	49.776
Sei Suka	52.599	53.010	53.206	53.476	55.045	55.570
Medang Deras	47.967	48.735	49.053	49.302	51.698	52.414
Batu Bara	375.885	379.400	381.023	382.960	396.479	400.803

Sumber: BPS Kabupaten Batu Bara, (2022)

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kecamatan di Kabupaten Batu Bara, 2010, 2014, dan 2015

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2020	2021	2022	2017-2022	2021-2022
Sei Balai	26 909	27 609	27 827	0,68	0,79
Tanjung Tiram	63 212	66 749	67 492	1,35	1,11
Talawi	53 782	57 128	57 860	1,52	1,28
Lima Puluh	85 437	89 033	89 864	1,04	0,93
Air Putih	46 886	49 217	49 776	1,23	1,14
Sei Suka	52 768	55 045	55 570	1,06	0,95
Medang Deras	48 180	51 698	52 414	1,77	1,39
Batu Bara	377 174	396 479	400 803	1,14	1,09

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Batu Bara
2022

Berdasarkan data diperoleh kepadatan penduduk di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2015 sebesar 443,00 jiwa/km². Kepadatan terbesar di Kecamatan Medang Deras sebesar 801,00 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Sei Suka sebesar 324,00 jiwa/km².

Tabel 4.4. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara, 2022

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Sei Balai	6,94	300
Tanjung Tiram	16,84	388
Talawi	14,44	644
Lima Puluh	22,42	375
Air Putih	12,42	689
Sei Suka	13,86	324
Medang Deras	13,08	801
Batu Bara	100,00	443

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan pada tahun 2022 sebesar 1:1, artinya dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Bila dilihat *sex ratio* di tiap kecamatan, maka Kabupaten Batu Bara yang memiliki ratio perempuan terkecil yaitu 199.106 jiwa penduduk dan yang memiliki ratio laki-laki terbesar yaitu 201.697 jiwa penduduk.

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara 2022.

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis
				Kelamin
Sei Balai	13 912	13 915	27 827	100
Tanjung Tiram	34 617	32 875	67 492	105
Talawi	29 282	28 578	57 860	102
Lima Puluh	44 700	45 164	89 864	99
Air Putih	24 705	25 071	49 776	99
Sei Suka	27 987	27 583	55 570	101
Medang Deras	26 494	25 920	52 414	102
Batu Bara	201 697	199 106	400 803	101

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

4.1.3 Potensi Pariwisata Kabupaten Batu Bara

Daya tarik wisata lain yang menonjol dan sangat layak untuk dikembangkan di Kabupaten Batu Bara adalah wisata pantai sepanjang pesisir timur kabupaten yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Beberapa destinasi wisata pantai yang ada di Kabupaten Batu Bara diantaranya Pantai Bunga; Pantai Alam Datuk; Pantai Perjuangan/Pantai Jono; Pantai Bunga Laut Indah; Waduk Indah dan Danau Laut Tador.

Sementara untuk daya tarik buatan di Kabupaten Batu Bara dapat dikategorikan ke dalam kelompok wisata sejarah, diantaranya Istana Niat Lima Laras; Komplek Makam Raja Lima Laras; Kubah Datu Bara; Meriam Bogak; Meriam Namasiam; Komplek Masjid Padang Gennting; Meriam Simpang Dolok; Sumur Bor Simpang Dolok; Situs Pemakaman Masjid Lamo; Kompleks Makam Wan Alang; Benteng Jepang; Meriam Datuk Simuangsa; Istana Indrapura; Masjid Indrapura; dan Kompleks Makam Raja Indrapura.

Tabel 4.6. Jenis, Bentuk dan Lokasi Wisata Objek Wisata di Kabupaten Batu Bara

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Alamat/Lokasi
1.	Istana Lima Laras	Budaya/ Sejarah	Desa Lima Laras Kec. Tanjung Tiram
2.	Kubah Datuk Keramat	Religi	Desa Kuala Gunung Kec. Lima Puluh
3.	Danau Laut Tador	Rekreasi	Desa Laut Tador Kec. Sei Suka
4.	Pantai Perjuangan	Rekreasi	Desa Lalang Kec. Medang Deras
5.	Pantai Sejarah	Rekreasi	Desa Perupuk Kec Lima Puluh
6.	Pantai Bunga	Rekreasi	Desa Tanjung Tiram
7.	Wisata Alam Datuk	Rekreasi	Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka
8.	Pulau Pandan	Rekreasi/Bahari	Sebelah Utara Tanjung Tiram

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Alamat/Lokasi
9.	Pulau Salah Nama	Rekreasi/Bahari	Selat Malaka, Bagian dari Kab. Batu Bara
10.	RM 100	Kuliner	Kec. Sei Suka
11.	Kain Tenun Batu Bara	Kerajinan	Desa Simpang Dolok
12.	Istana Kerajaan Indrapura	Budaya/ Sejarah	Indrapura Kec. Air Putih
13.	Kebun Dolok	Rekreasi	Desa Modang
14.	Tugu Perjuangan	Peninggalan Sejarah	Desa Sei Suka Kec. Air Putih
15.	Rumah Makan Bale Resto	Kuliner	Jl. Lintas Sumatera – Kisaran Kec. Sei Balai
16.	Benteng Perang Peninggalan Jepang	Budaya/ Sejarah	Desa Perupuk Kec. Lima Puluh
17.	Meriam Simpang Dolok	Budaya/ Sejarah	Simpang Dolok Kec. Lima Puluh
19.	Rumah Makan Ladang Sari	Kuliner	Jl. Lintas Sumatera

Sumber : RTRW Kabupaten Batu Bara

Tabel 4.7. Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2016 di Kabupaten Batu Bara

NO.	OBJEK WISATA	JLH. WISATAWAN	KET
1	Pantai Bunga	30.556	
2	Pantai Galuh	663	
3	Pulau Salah Namo	1.556	
4	Pulau Pandang	1.556	
5	Istana Niat Lima Laras	873	
6	Meriam Bogak	243	
7	Pantai Bali	20.823	
8	Pantai Sejarah	702	
9	Kubah Keramat Datok	113	
10	Meriam Simpang Dolok	253	

11	Pantai Alam Datuk	80.456
12	Daun Laut Tador	500
13	Pantai Sujono	257.916
14	Meriam Nenas Siam	563
	JUMLAH	396.773

Menyadari akan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memasuki era otonomi dan globalisasi berupaya membenahi kepariwisataan Kabupaten Batu Bara dari segala aspek dengan tujuan meraih tempat sebagai daerah tujuan wisata utama, sehingga sektor kepariwisataan menjadi sumber atau pemasok dana strategis dalam menunjang pembangunan daerah.

Agar potensi kepariwisataan dapat berkembang dan dapat dijadikan sebagai produk andalan yang layak dijual di pasar global, harus ditangani oleh tenaga profesional di bidang kepariwisataan. Tenaga profesional diartikan bahwa tenaga-tenaga aparatur pemerintah pengelola pariwisata yang mampu membawa dan menggerakkan organisasi pariwisata dan masyarakat membangun sektor kepariwisataan dengan mengacu kepada visi pembangunan yang telah ditetapkan.

4.1.4 Profil Objek Wisata Unggulan di Kabupaten Batu Bara

1. Pulau Salah Namu

Pulau Salah Namu terletak di Kecamatan Tanjung Tiram, dan dapat dicapai dengan menggunakan angkutan laut berupa perahu motor dengan jarak tempuh lebih kurang 1(satu) jam perjalanan dari dermaga di Tanjung Tiram. Pulau Salah Namu disebut demikian karena pulau ini diberi nama dengan sejenis burung, yang bagi penduduk lokal sebutan burung itu menyangkut hal yang tabu untuk disebutkan. Untuk tidak menimbulkan persepsi yang tidak diinginkan akhirnya masyarakat menyebutnya dengan sebutan Pulau Salah Namu. Pulau Salah Namu

masih diapit oleh beberapa pulau-pulau karang kecil yang pada saat air surut gugusan karang terlihat dengan jelas. Dibagian depan yang menghadap ke daratan induk terdapat sedikit kawasan pepantaraan dengan pasir putih dengan bebatuan.

2. Pulau Pandang

Pulau Pandang bukan merupakan pulau terluar Indonesia. Untuk sampai ke Pulau Pandang dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dengan menggunakan perahu motor. Pulau Pandang juga merupakan tempat persinggahan berbagai jenis Penyu untuk bertelur. Banyaknya penyu yang bertelur di pulau ini memungkinkan pulau ini dijadikan sebagai wilayah konversi alam dengan tugas pokok penangkaran penyu (utamanya penyu Belimbing).

3. Pantai Perjuangan/Pantai Jono

Pantai Perjuangan/Pantai Jono merupakan destinasi wisata pantai yang sudah sangat dikenal oleh wisatawan lokal sebagai sarana rekreasi yang sering dikunjungi. Destinasi wisata yang terletak di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras ini dapat dijangkau dengan mudah karena letaknya yang tidak terlalu jauh dari jalan utama. Ciri utama dari pantai ini adalah hamparan pasir putihnya yang demikian luas.

4. Pantai Bunga

Disamping Pantai Perjuangan/Pantai Jono, di Kabupaten Batu Bara masih terdapat sejumlah pantai lain dengan model pengelolaan dan fasilitas yang lebih kurang sama dengan Pantai Perjuangan/Pantai Jono, diantaranya Pantai Bunga di Kecamatan Tanjung Tiram. Ciri utama dari pantai ini adalah tanaman mangrove.

5. Pantai Wisata Alam Datuk

Pantai Alam Datuk Kota Sungai Pasir terletak di Desa Kuala Indah

Kecamatan Sei Suka. Dilokasi wisata alam datuk terdapat beberapa wahana permainan anak, dan sarana perpakiran yang cukup luas. Pantai alam datuk berlatar belakang Port dan Smelter PT. Inalum.

6. Danau Laut Tador

Pesona Danau Laut Tador yang berlokasi di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara tepatnya ditengah-tengah perkebunan sawit PT. Paya Pinang Group. Sekitar Danau Laut Tador terdapat tumbuhan yang usianya ratusan tahun dan diyakini disekitar danau itu terdapat ratusan jenis tumbuh-tumbuhan, bisa menjadi objek pelajaran bagi anak-anak sekolah untuk mengetahui keadaan alam maupun jenis tumbuhan.

7. Istana Lima Laras

Istana lima laras merupakan bangunan bersejarah peninggalan Raja Lima Laras Datuk Muhammad Yuda yang merupakan keturunan Raja yang ke-11. Beliau berkuasa sekitar tahun 1883 sampai dengan 1919. Raja terakhir yang berkuasa adalah Datuk Muda Abdul Roni yang mengakhiri kekuasaannya sekitar tahun 1923. Setelah masa itu semua kekuasaan atas Istana lima laras jatuh ke tangan Belanda. Pada zaman revolusi fisik Istana Lima Laras dijadikan sebagai markas dari Tentara Nasional Indonesia.

4.2 Hasil Penelitian

1. Pengawasan Partisipatif dalam pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Batubara.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dalam pengawasan pariwisata, Kabupaten Batu Bara selalu memberikan motivasi kepada masyarakat, yang bertujuan agar meningkatnya kesadaran akan pentingnya sektor pariwisata. Sikap

masyarakat yang cenderung ke arah oportunistis namun negatif juga menjadi salah satu hambatan yang perlu segera di atasi.

Pengawasan pariwisata, selain dapat digunakan sebagai salah satu sumber pemasukan daerah juga dapat digunakan sebagai sarana melestarikan budaya dan kearifan lokal. Dengan melihat beragamnya potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten batubara, Pemerintah Daerah sebagai salah satu stakeholder pengembang pariwisata sudah seharusnya dapat mengoptimalkan potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batubara

1. Partisipasi Pemerintah

Peran untuk mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya sebagai :

a. Motivator

Dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah Kabupaten batubara sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengembangan pariwisata tidak bisa dilepaskan dari dukungan investor, pengusaha wisata serta masyarakat.

Investor sebagai pemilik modal dapat menanamkan modalnya di obyek obyek wisata, pengusaha di bidang pariwisata dapat mengembangkan usahanya sekaligus dapat membantu mengembangkan pariwisata di Kabupaten batubara, dan masyarakat mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari perkembangan pariwisata di lingkungan mereka.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Widaruna SE, selaku Kepala Bidang pariwisata bahwa hal yang telah dilakukan, pemerintah daerah Kabupaten Batubara, melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah melakukan beberapa upaya untuk memotivasi kalangan investor, pengusaha wisata serta masyarakat agar tertarik turut serta mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Batubara melalui program sosialisasi sadar wisata, pelatihan pengelolaan usaha wisata, sampai dengan dukungan dana stimulant bagi usaha wisata berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Promosi dan pemasaran Selama ini, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas pemasaran Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bapak Rizky dalam memotivasi masyarakat peneliti nilai belum cukup optimal, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata yang masih rendah. Masih terdapat beberapa kalangan masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pariwisata, meskipun sebagian lagi telah mengerti dan mulai mengembangkan usaha wisata secara swadaya dalam bentuk Desa Wisata.

Melalui program sosialisasi dan promosi wisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga terus mengupayakan kalangan investor dan pengusaha wisata agar tertarik turut mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Batubara, namun peneliti melihat upaya tersebut juga masih belum optimal, sehingga investor dan pengusaha wisata selama ini belum tertarik untuk ikut mengembangkan potensi pariwisata di

Kabupaten Batubara. Hal tersebut dapat dilihat dari masih sepiunya kegiatan usaha dan pengembangan yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti di Pantai Jono, Laut Tador, Pantai Bunga dan lain sebagainya.

b. Fasilitator

Sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Batubara, peran dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah untuk menyediakan berbagai fasilitas, baik fasilitas fisik maupun non fisik. Menurut kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Sapri, MM, beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas adalah menyediakan sarana prasarana obyek wisata, memfasilitasi pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat seperti Desa Wisata, penyediaan informasi terkait potensi ekonomi wisata pada pihak ketiga sampai dengan promosi obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Batubara.

Pada dasarnya, peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata organisasi pariwisata di Kabupaten Batubara terkandung dalam peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2008, mengenai tugas dan fungsi pokok organisasi terendah Dinas.

Selama ini upaya pemerintah daerah tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana prasarana di obyek wisata, seperti pembangunan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pokok pariwisata, sampai dengan pembangunan fasilitas pendukung usaha pariwisata. Selanjutnya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga berupaya untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan dana pengembangan usaha

melalui pengajuan bantuan pada PNPM mandiri, selain itu fasilitas juga diberikan pada investor dan pengusaha wisata dalam bentuk bantuan promosi obyek wisata swasta, sampai dengan pemberian informasi pada pengusaha wisata seperti lokasi lahan potensial usaha wisata, potensi wisata yang belum tergarap dan lain sebagainya.

Khusus untuk penyediaan sarana prasarana obyek wisata, peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga masih sangat dominan, sedangkan pada realitanya sumber anggaran yang dimiliki dinas terbatas, sehingga sarana prasarana di beberapa obyek wisata terlihat masih sangat kurang jumlahnya, seperti di Pantai Bunga, Pantai Wisata, dan Pantai Jono. Faktor yang paling mempengaruhi adalah masih minimnya partisipasi dari pihak ketiga dalam pengembangan pariwisata yang secara tidak langsung memaksa pemerintah daerah sebagai stakeholder pengembang wisata untuk memfasilitasi sebagian besar sarana prasarana yang terdapat di Obyek Wisata, akibatnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah tersebut seakan akan hanya habis untuk membiayai penyelenggaraan di obyek obyek wisata.

Investor dan pengusaha wisata sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan wisatawan sudah seharusnya juga memberikan kontribusi yang lebih dalam pengembangan pariwisata, sehingga pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder wisata tidak kewalahan khususnya dalam pembiayaan pengembangan pariwisata, lebih jauh lagi, pemerintah daerah harus mampu bersinergis dengan pihak lain, sehingga permasalahan tentang keterbatasan sumber daya dapat diatasi.

c. Dinamisator

Dalam pilar Good Governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata di Kabupaten Batubara memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Sebagai upaya dinamisasi antar stakeholder pengembang pariwisata di Kabupaten Batubara, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga selama ini telah melakukan berbagai hal terkait dengan kerja sama antar sektor, baik itu sektor swasta, sektor pemerintahan lainnya, maupun masyarakat. Upaya dinamisasi ini utamanya diwujudkan melalui berbagai kesempatan dialog mengenai perkembangan pariwisata dengan pihak-pihak tersebut.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata

Partisipasi masyarakat merupakan partisipasi yang aktif, baik dalam (a) perencanaan, (b) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan, serta (c) pengawasan dan evaluasi dalam program pengembangan objek wisata Kabupaten Batubara.

a. Perencanaan

Perencanaan dalam objek wisata yaitu pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan objek wisata yang merupakan perhatian pertama yang harus di ambil oleh pihak swasta selaku penggagas objek wisata untuk melihat sejauh mana apresiasi masyarakat dengan

rancangan tempat wisata ini. Wawancara dengan Ketua Pemberdayaan Masyarakat Pesisir selaku Kepala Desa di Pantai Bunga Bapak Suyitno menyatakan bahwa.

“Saya sangat mengapresiasi saat direncanakan bahwa tempat ini akan dijadikan sebagai destinasi wisata karena sama halnya ini akan memperkenalkan desa saya dimasyarakat luas dan akan banyak hal positif yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar”. (hasil wawancara dengan Bapak Suyitno, 23 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam hal perencanaan pembangunan objek wisata perwakilan masyarakat sangat menyambut baik dengan adanya objek wisata ini. Partisipasi masyarakat dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam perencanaan kebijakan yang telah diciptakan oleh pihak swasta untuk membangun tempat wisata adalah bentuk hal penting. Penjelasan yang diberikan informan tersebut juga senada dengan keterangan yang diberikan oleh salah satu pekerja tempat wisata selaku masyarakat menyatakan bahwa:

“ Sebelum jadi semua wahana ditempat wisata ini, saya diikut andilkan dalam perencanaan tempat wisata, kami kemudian dipanggil untuk turut berpartisipasi dalam membangun tempat wisata ini agar teralaksana dengan cepat dan baik ” (hasil wawancara dengan Ferdi, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa memang yang turut dilibatkan untuk berpartisipasi dalam perencanaan untuk mengembangkan tempat wisata ini adalah masyarakat pada umumnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dibutuhkan untuk menarik daya kreatifitas apa yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat tercipta suasana yang baru dan belum pernah ada sebelumnya di Kabupaten Batubara.

Berikut adalah pernyataan dari Masyarakat sekitar selaku pekerja di tempat wisata.

“ Inisiatif dari pendiri tempat wisata ini sangat disambut baik oleh masyarakat sekitar. Perencanaan mulai dari segi desain tempat dan letak strategis sudah direncanakan dengan baik oleh pihak swasta ini berdasarkan aspirasi masyarakat juga. Mereka melakukan refleksi perencanaan dengan matang” (hasil wawancara dengan Hamdan, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam perencanaan pengembangan objek wisata aspirasi masyarakat sangatlah di dengarkan penjabarannya karena merekalah yang akan terjun langsung sebagai penyelenggara dan secara umum sebagai unsur partisipatif untuk terus mengembangkan objek wisata selanjutnya. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah partisipasi langsung dalam mengembangkan objek wisata di wilayahnya.

b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan objek wisata yaitu tindakan setelah membahas dan sudah memiliki keputusan yang jelas tentang pengembangan objek wisata tersebut maka perlu dipetakan untuk memperjelas siapa pihak yang akan mengelola dan melakukan pelayanan disetiap pembagian kerja diluar dari partisipasi masyarakat itu sendiri.

Wawancara dengan Pendiri objek wisata Pulau Pandang adalah sebagai berikut:

“ Saya yang terjun langsung untuk mengelola tempat wisata ini untuk melihat capaian dari kinerja masyarakat yang turut berpartisipasi dalam mengembangkan objek wisata ini “ (hasil wawancara dengan Pandi Lubis, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara diatas pendiri tempat wisata terjun langsung untuk melakukan pengelolaan agar ia dapat menyaksikan sejauh mana perkembangan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan objek wisata Pulau Pandang. Karena masyarakat pada umumnya di tugaskan untuk melayani pengunjung secara langsung.

Pernyataan berikut sama halnya yang di paparkan oleh masyarakat selaku pekerja di tempat wisata .

“Setelah melakukan koordinasi langsung dengan pihak pengelola, kami selaku masyarakat melakukan strategi bagaimana melaksanakan pekerjaan masing- masing dan bagaimana cara melayani masyarakat sebagai pengunjung dengan baik” (hasil wawancara dengan Kardi, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengembangan pariwisata dalam hal ini melibatkan semua lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah, baik kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat biasa diharapkan turut membantu dan menunjang keberhasilan pengembangan pariwisata. Dilihat dari sisi partisipasi masyarakat, strategi ini lebih memungkinkan timbulnya keikutsertaan masyarakat, Pemerintah Pulau Pandang dan Pemerintah Daerah Batubara untuk memajukan obyek wisata Pulau Pandang yaitu mulai dari pengelolaan dan pelayanan telah melibatkan masyarakat secara luas.

Penjelasan yang diberikan informan tersebut juga senada dengan keterangan yang diberikan oleh pekerja di objek wisata Pulau Pandang selaku masyarakat menyatakan bahwa:

“Yang melakukan pengelolaan tempat dan melakukan pelayanan seutuhnya juga adalah masyarakat, karena yang dilibatkan dalam segala hal adalah masyarakat itu sendiri. Kami yang berperan langsung dan pihak swasta yang memfasilitasi apa saja kreatifitas masyarakat, dan ini harus dilaksanakan

dengan baik untuk kenyamanan pengunjung “ (hasil wawancara dengan Suyanto, 23 Agustus 2023).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengelolaan dan pelayanan pada objek wisata adalah hal yang sangat perlu diperhatikan dan disusun rapi oleh pihak pengelola. Kenyamanan seorang pengunjung juga di dasari dari cara seorang pekerja melayani pengunjung dengan baik sesuai dengan pelayanan maksimal yang telah di paparkan sebelumnya oleh pihak pengelola mulai dari saat mereka memasuki area wisata sampai pada pelayanan disetiap wahananya.

Wawancara dengan masyarakat selaku pekerja ditempat wisata adalah sebagai berikut: “Bisa dilihat dari awal direncanakannya tempat wisata ini, pengunjung sangat berantusias dengan baik untuk datang bersama-sama ketempat ini. Peluang untuk mendapatkan pelayanan dengan baik adalah sebagian dari impian mereka.

Pengunjung adalah asset terbesar dari tempat wisata ini, jadi kami harus melayani mereka dengan baik” (hasil wawancara dengan Anto, 23 Agustus 2023) Berdasarkan wawancara di atas di simpulkan bahwa seperti pada umumnya ditempat lain yang bergerak dibidang rekreasi masyarakat, maka setiap apa saja yang dilakukan pekerja adalah untuk kenyamanan pengunjung. Jadi, mereka perlu beretika dengan baik selaku pekerja ditempat wisata. Inilah yang akan menunjang pendapatan sebuah objek wisata jika para pekerja melaksanakan tugas dan pelayanan dengan baik pula

c. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi dalam program pengembangan objek wisata yaitu Banyak pihak yang dilibatkan dalam pengembangan objek wisata terlebih karena ini adalah gagasan pemikiran dari masyarakat setempat. Oleh karena itu agar objek wisata ini tetap berjalan dengan baik sesuai harapan dari berbagai pihak maka diperlukan pengawasan yang baik dan melihat sejauh mana tingkat kemajuannya.

Wawancara dengan Ketua Pemberdayaan Masyarakat Pesisir selaku

Kepala Desa Pantai Bunga :

“ Kebijakan yang sudah di keluarkan oleh pemerintah untuk peningkatan destinasi wilayah pesisir yang setiap harinya hanya begitu saja keadaannya sehingga muncullah pemikiran dari masyarakat untuk menyerukan hingga berdirinya tempat wisata ini. Respon kami yang baik adalah, bagaimana mengawal mereka untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan melihat kinerja mereka secara individu” (hasil wawancara dengan Tarman, 23 Agustus 2023).

Berdasarkan wawancara di atas pihak pemerintah desa secara tidak langsung bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari setiap masyarakat yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mengembangkan tempat wisata ini. Masyarakat telah membagi diri untuk bersama-sama menciptakan hal-hal baru dan berusaha untuk mempertanggung jawabkannya dengan baik.

Sama juga halnya yang di paparkan oleh masyarakat selaku pekerja di objek wisata Pulau Pandang :

“ Ada yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja secara langsung. Saya sangat menyambut baik hal ini karena di antara kami tidak akan muncul kesenjangan dan persaingan yang kurang sehat karena kami memiliki misi yang sama untuk mengembangkan tempat wisata ini karena

ini juga akan berdampak baik kepada kami” (hasil wawancara dengan Suyitno, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa telah ditunjuk untuk mengelola langsung dan menentukan petugas-petugas objek wisata secara khusus, dengan demikian tidak akan timbul lagi kesenjangan di mata masyarakat terkait dengan pelayanannya. Terkait dengan bagaimana seorang pekerja menjalankan fungsinya maka akan ada pihak yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi tempat wisata.

3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata memiliki beberapa pembagian atau bentuk-bentuk partisipasinya. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu di bidang sarana dan prasarana serta di bidang promosi.

a. Partisipasi Masyarakat di Bidang Sarana dan Prasarana

Partisipasi masyarakat di bidang sarana dan prasarana adalah partisipasi masyarakat dengan melihat kesediaan (a) sarana transportasi dan (b) prasarana wahana dan tempat lainnya yang disediakan oleh pihak pengelola objek wisata di Kabupaten Batubara.

1) Tersedianya Sarana

Unsur penting dalam pengembangan kawasan wisata adalah keterlibatan masyarakat sekitar tempat wisata dalam setiap aspek

yang ada di tempat wisata tersebut. Pengembangan tempat wisata sebagai penjabaran dari konsep pariwisata inti yang mengandung arti bahwa masyarakat desa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata.

Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat diluar keluar kegiatan sehari-harinya.

Berikut adalah wawancara dengan masyarakat selaku pekerja di tempat wisata.

“Pihak pengelola telah merancang dengan baik seluruh akses berdasarkan kebutuhan masyarakat meskipun itu belum terlalu sempurna karena setidaknya ketersediaan akses untuk tempat ini sudah baik sehingga dapat menarik minat pengunjung”. (hasil wawancara dengan Kardi, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa desain dengan baik yang telah dilakukan pendiri tempat wisata atas masukan dan partisipasi masyarakat akan dikembangkan dengan baik sejalan dengan penyediaan akses jalan yang sudah dikembangkan dengan baik atas dukungan pemerintah dan akan dimaksimalkan dengan baik oleh masyarakat.

Sama hanya dengan paparan dari pendiri tempat wisata ini :

“ Melihat jalan yang akan dilalui oleh pengunjung sudah baik atas dukungan dari pemerintah. Arus transportasi umum yang juga sudah memasuki area ini namun belum maksimal juga akan diperbaiki dan akan disediakan untuk pengunjung yang belum memiliki kendaraan pribadi ” (hasil wawancara dengan Pandi, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sarana adalah sebuah simbolis dari tempat wisata. Perlu sangat ditingkatkan untuk penyediaan sarana yang baik dari segi apapun. Akses jalan dan pengadaan transportasi umum yang

biasanya menjadi kendala untuk tempat wisata akan dimaksimalkan agar dapat dijangkau dengan baik dan nyaman oleh kendaraan umum.

Begitu pula yang dikatakan oleh masyarakat selaku pekerja di tempat wisata tentang partisipasinya di bidang sarana.

“ Pihak pendiri sedang merintis alat transportasi pelaku wisata yang ingin lebih menikmati liburannya dengan menyediakan kendaraan khusus pengunjung yang siap antar jemput ataupun yang tidak memiliki kendaraan pribadi”. (hasil wawancara dengan Suyitno, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Perencanaan awal dari pihak pengelola perlu dikembangkan untuk penyediaan sarana tempat wisata seperti kendaraan umum yang ada dan keluar masuk di area objek wisata. Oleh karena itu pihak pengelola perlu menjalin kemitraan dengan pihak perhubungan.

2) Tersedianya Prasarana

Partisipasi masyarakat di bidang prasarana adalah partisipasi masyarakat untuk penyediaan wahana. Unsur penting dalam pengembangan kawasan wisata adalah keterlibatan masyarakat sekitar tempat wisata dalam setiap aspek yang ada di tempat wisata tersebut. Pengembangan tempat wisata sebagai penjabaran dari konsep pariwisata inti yang mengandung arti bahwa masyarakat desa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat diluar keluar kegiatan sehari-harinya. Berikut adalah wawancara dengan masyarakat selaku pekerja di tempat wisata.

“Pihak pengelola telah merancang dengan baik seluruh fasilitas berdasarkan

kebutuhan masyarakat meskipun itu belum terlalu sempurna karena stetidaknya ketersediaan tempat beristirahat dan letak strategis tempat ini sehingga dapat menarik minat pengunjung”. (hasil wawancara dengan Suyanto, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa prasarana adalah sebuah simbolis dari tempat wisata. Perlu sangat ditingkatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang baik dari segi apapun. Begitu pula yang dikatakan oleh masyarakat selaku pekerja di tempat wisata tentang partisipasinya di bidang sarana dan prasarana.

“ Atasan kami sedang merintis alat transportasi pelaku wisata yang ingin lebih menikmati liburannya dengan menyediakan kendaraan khusus pengunjung yang siap antar jemput ”. (hasil wawancara dengan Anto, 23 Agustus 2023)

Perencanaan awal dari pihak pengelola perlu dikembangkan untuk penyediaan sarana dan prasarana tempat wisata seperti lahan yang luas, tempat penginapan yang memadai dan latar tempat yang baik dan indah. Oleh karena itu pihak pengelola perlu menjalin kemitraan dengan pemerintah atau dengan pengusaha swasta. Inilah yang dituturkan oleh Ketua pemberdayaan masyarakat pesisir selaku Kepala Desa.

“ Ada beberapa fasilitas yang disiapkan dan setiap pekerja disini sudah memiliki peran masing-masing meskipun belum terlalu banyak tenaga kerja. Ada yang mengurus wahana permainan, kolam renang, gazebo, tempat ibadah, kantin atau resto, parkir, dan karcis untuk masuk ”. (hasil wawancara dengan Ibu Lastri, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa setiap wahana ataupun tempat yang disediakan oleh pihak pengelola maka pekerja yang akan bertanggung jawabkan tugasnya masing-masing. Berikut adalah wawancara dengan masyarakat selaku pekerja di tempat wisata.

“Saya petugas yang mengurus untuk penyediaan gazebo bagi pengunjung dan ini memiliki konsekuensi tersendiri untuk melayani permintaan pengunjung dengan tarif yang sudah ditetapkan “. (hasil

wawancara dengan Hendrik, 23 Agustus 2023) Setelah melakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bidang sarana dan prasarana adalah hal yang sangat berpengaruh besar.

Masyarakat sebagai tenaga kerja adalah tombak dari sebuah pekerjaan terlebih untuk tempat wisata ini yang cukup membutuhkan tenaga dan kerja keras.

b. Partisipasi Masyarakat di Bidang Promosi Objek Wisata

1) Promosi Lisan

Promosi lisan adalah hal yang dilakukan oleh masyarakat selaku pelaku partisipan untuk melakukan tindakan memperkenalkan objek wisata melalui audio atau apapun yang bukan dalam bentuk tulisan. Berikut adalah wawancara dengan masyarakat selaku pekerja ditempat wisata.

“Setelah mendapat izin pembangunan dari pemerintah saya sudah banyak melihat banyak postingan dari pihak pengelola terkait serta masyarakat dimedia sosial untuk mempromosikan tempat ini dengan berbagai macam kreasi wacana “ (hasil wawancara dengan Anto, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa promosi lisan dilakukan dengan berbagai cara. Pembuatan video atau audio lainnya adalah untuk pendukung untuk mempromosikan tempat wisata. Berikut adalah pemaparan dari masyarakat selaku pekerja di tempat wisata :

“Ada orang yang bersedia membuatkan video sebelum tempat wisata ini di buka oleh karena itu kami termasuk mudah untuk menarik minat pengunjung “ (hasil wawancara dengan Kardi, 23 Agustus 2023).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pada hakikatnya telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkreasi dan melakukan pembangunan sarana rekreasi keluarga. Namun ini diperlukan perencanaan yang lebih matang, terlebih untuk tindakan promosi yang harus di jalankan semua pihak yang terkait di dalamnya.

2) Promosi Tulisan

Promosi tempat wisata dianggap sebagai rencana atau strategi yang wajib untuk dilaksanakan sebagai modal investasi kedepannya. Terkadang tindakan promosi dianggap hal yang biasa dan terkadang ada pihak yang sedikit lupa untuk tindakan ini. Berikut adalah wawancara dengan masyarakat selaku pekerja di tempat wisata antara lain :

“Ada beberapa strategi yang pihak pengelola lakukan untuk mempromosikan tempat ini seperti pemasangan spanduk atau baligho disepanjang jalan di kota Takalar pada khususnya ”. (hasil wawancara dengan Suyitno, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa strategi promosi tulisan termasuk strategi yang utama juga. Pembuatan alat promosi lainnya yang di dukung oleh pihak lain juga akan menjamin bahwa banyak pengunjung yang akan datang Begitu pula yang dikatakan oleh masyarakat selaku pekerja ditempat wisata:

“Saya diberikan amanah untuk membagikan beberapa selebaran kepada masyarakat disekitar tempat wisata ini dulu, kemudian berangsur menyebarkan ke masyarakat luas sebagai strategi dalam mempromosikan tempat wisata “. (hasil wawancara dengan Hendrik, 23 Agustus 2023).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa masyarakat yang turut bekerja serta pihak pengelola tetap akan melakukan pengembangan isu lokal

tentang tempat wisata ini agar kedepannya pengunjung akan tetap menjadikan tempat wisata ini sebagai tujuan utama untuk mengajak dan menghibur keluarga mereka. Pembangunan seluruh sarana juga akan tetap dilaksanakan selama itu masih untuk kenyamanan pengunjung, itulah bentuk promosi selanjutnya. Berikut adalah wawancara dengan masyarakat selaku pekerja ditempat wisata :

“ Strategi lain yang dimunculkan yaitu bagaimana kita menampilkan wacana dan gambar-gambar ilustrasi dari tempat yang sudah kami rancang sehingga membuat masyarakat tertarik untuk berkunjung bersama keluarga mereka “. (Wawancara 23 Agustus 2023)

Begitupula wawancara yang dilakukan kepada Ibu Misna selaku pekerja ditempat wisata.

“Bentuk promosi dari pihak kami yaitu ada berbagai macam, bukan hanya dengan bentuk selebaran ataupun baligho tetapi kami juga mengajukan promosi audio di radio local“. (Wawancara 23 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan yang berbeda maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dibidang promosi merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari pengambilan kebijakan pembangunan tempat wisata. Promosi tempat wisata pulau pandang dilakukan dengan berbagai strategi untuk dikerjakan semaksimal mungkin.

c. Partisipasi Pemeliharaan Kebersihan

Pemeliharaan kebersihan objek wisata perlu diperhatikan demi kenyamanan para wisatawan/pengunjung saat berwisata. Menjaga kebersihan Pantai Bunga akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu dengan pengurus Pantai Jono yang mengatakan bahwa:

“...Salah satu kendala yang ada di Pantai Bunga adalah banyaknya daun-daun kering yang berjatuh di dalam pantai. Pemeliharaan kebersihan pantai hanya dilakukan seminggu sekali saja dengan dibantu oleh 2 orang tukang bersih”, (Wawancara, Yusril, 23 Agustus, 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh pekerja kebersihan di Pantai

Bunga yang mengatakan bahwa:

“...Masyarakat yang tinggal disekitar pantai kurang memperhatikan kebersihan Pantai BUNgamereka acuh tak acuh lagi, padahal jika pemeliharaan kebersihan pantai Bunga diperhatikan maka suasana di Pantai Bunga akan tambah sejuk lagi”. (Wawancara, Maslina, 23 Agustus 2023) .

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa menjaga kebersihan Pantai Bunga sangat perlu diperhatikan demi kenyamanan pengunjung sehingga suasana semakin nyaman terasa, ketika angin berembus dari sela-sela pohon kelapa yang berderet rapi di bibir pantai. Sehingga membuat para wisatawan akan senang berkunjung ke Pantai Bunga.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu dengan pemilik Pantai Bunga yang mengatakan bahwa:

“...Pemeliharaan kebersihan pantai sudah kurang terjaga dikarenakan kurangnya pengurus pantai yang bersedia membantu, menjaga, dan memelihara kebersihan pantai. Saya harus mengeluarkan uang pribadi saya untuk membayar orang agar menjaga dan memelihara kebersihan Pantai Bunga”. (Wawancara, Yono, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa Pemeliharaan kebersihan objek wisata perlu diperhatikan demi kenyamanan para wisatawan/pengunjung saat berwisata. Menjaga kebersihan Pantai

Bunga akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang datang ke Pantai Bunga.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata alam Pantai Bunga haruslah memperhatikan kebersihan Pantai Bunga agar wisatawan saat berkunjung akan merasa nyaman dan betah saat berada di Pantai Bunga. Dikarena suguhan panorama alamnya mampu menghilangkan sejenak rasa capek akibat aktivitas yang padat.

d. Pemeliharaan Keamanan Dan Kenyamanan

Keamanan dan kenyamanan, ada 2 hal yang saling berkaitan dalam hubungan sebab akibat. Dimana terdapat rasa aman, pastinya akan menimbulkan rasa nyaman. Begitu juga sebaliknya, kenyamanan wisatawan akan didapat jika rasa aman sudah terpenuhi seperti di objek wisata alam Pantai Bunga.

Pada dasarnya wisatawan mendatangi objek wisata dengan tujuan mendapatkan kesenangan sehingga para pengelola pariwisata harus memberikan jaminan keamanan pada yang datang. Tapi tidak dengan objek wisata alam Pantai Bunga sendiri keamanannya masih cukup memprihatinkan disebabkan karenanya banyak anak muda yang datang kesana mabuk-mabukan dan mengakibatkan perkelahian antar pengunjung wisatawan dengan masyarakat yang tidak senang perilaku pengunjung yang datang sehingga inilah salah satu yang membuat wisatawan yang ingin berkunjung menjadi menurun.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu pengurus Pantai Bunga yang mengatakan bahwa:

“...Mengenai soal rasa keamanan dan juga kenyamanan yang ada di Pantai Bunga memang masih jauh dari yang diharapkan, dikarenakan sering terjadi perkelahian yang dilakukan oleh anak muda yang datang ke Pantai Bunga akibat minuman keras. Selain itu juga kerusakan fasilitas sering terjadi setiap kali ada yang berkelahi”.(Wawancara, Pak Jabrik 23 Agustus 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh pengurus Pantai Bunga yang mengatakan bahwa:

“...Mengenai soal rasa keamanan dan juga kenyamanan yang ada di Pantai Bunga memang masih jauh dari yang diharapkan, dikarenakan sering terjadi perkelahian yang dilakukan oleh anak muda yang datang ke Pantai Bunga akibat minuman keras. Selain itu juga kerusakan fasilitas sering terjadi setiap kali ada yang berkelahi.”(Wawancara, Yono, 05, April, 2015).

Hal senada juga disampaikan oleh pemilik Pantai Jono yang mengatakan bahwa:

“...Melihat sering adanya perkelahian yang terjadi di Pantai Bunga ini, maka saya pribadi pemilik pantai beserta masyarakat setempat mulai membenahi hal tersebut sehingga tidak membuat minat wisatawan semakin menurun untuk datang ke Pantai Jono”. (wawancara, Kardi 23 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa peningkatan keamanan sangat perlu dilakukan demi menjaga rasa keamanan bagi para pengunjung saat berada di Pantai Bunga.

4. Faktor Yang Menghambat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Batubara

Dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Batubara. Ada faktor yang menghambat. Faktor-faktor ini harus dihadapi dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Batubara.

1. Keterbatasan Dana

Dana dalam pengelolaan objek wisata sangat penting. Setiap objek wisata membutuhkan dana yang besar dalam pengelolaannya. Karena objek wisata harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mampu menarik minat wisatawan untuk berwisata di objek wisata tersebut. Ketika semua itu tidak terpenuhi, maka objek wisata tersebut tidak akan banyak peminatnya. Dan ini yang menjadi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu pengurus Objek wisata yang mengatakan bahwa:

“...Mengenai hal tersebut faktor ataupun kendala yang dihadapi dalam mengelola objek wisata adalah masih minimnya dana. Kemudian dana yang diandalkan hanya dari dana pemilik objek wisata dan juga dana dari pengunjung yang digunakan untuk mengelola Pantai”. (wawancara, Kardi, 23 Agustus 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh pemilik Pantai yang mengatakan bahwa:

“...Yang jadi kendala dalam pengelolaan objek wisata ini yaitu masih minimnya dana yang kami peroleh untuk pengelolaan objek wisata ini. Tak kurang 450 juta uang pribadi saya gunakan untuk mengelola objek wisata”. (Wawancara, kardi 23, Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dana yang digunakan untuk mengelola objek wisata masih kurang untuk memperbaiki setiap fasilitas yang rusak. Dan seandainya

pemerintah daerah ikut ambil bagian dalam pengelolaan objek wisata ini, maka pembangunan objek wisata tersebut tidak akan mengalami kendala.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan bahwa:

“...Kami masih memerlukan dana tambahan lagi untuk membenahi setiap fasilitas yang ada di Pantai Bunga agar tetap meningkatkan daya tarik pengunjung wisatawan. Untuk meningkatkan daya tarik wisatawan maka yang harus diperhatikan adalah terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Selain itu kami dari kelompok pokdarwis ingin menambah atraksi wisata serta industri kerajinan yang dapat dijadikan sebagai cenderamata saat berkunjung ke Pantai Bunga. Sehingga juga mampu membantu sistem perekonomian masyarakat setempat yang tinggal di sekitar Pantai Bunga”.(Wawancara Kandri 23 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa untuk mengelola objek wisata alam Pantai Bunga memerlukan dana yang besar. Kemudian penyediaan fasilitas sarana dan prasarana salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan minat wisatawan untuk datang berkunjung di Pantai Bunga.

2. Kurangnya Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah

Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan dan pengelolaan objek wisata khususnya objek wisata alam Pantai Bunga memang harus dilakukan agar lebih cepat pembangunannya. Dengan suntikan dana yang diberikan dari pemerintah daerah dapat membantu proses pembangunan pengelolaan objek wisata.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Desa Kampala yang mengatakan bahwa:

“...Saya juga selaku kepala desa di Desa Kampala ini. Setujuh apa bila pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata ikut terlibat atau berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata ini, maka pembangunan

objek wisata tidak akan mengalami kendala. Dan dengan adanya objek wisata ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai”.

(Wawancara, KK, 23 Agustus 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh pemilik Pantai Karsut yang mengatakan bahwa:

“...Kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah membuat potensi alam yang dimiliki daerahnya menjadi hilang. Seandainya pemerintah ingin berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata ini, maka akan datang pendapatan asli daerah (PAD) dan juga akan meningkatkan pendapatan perekonomian bagi masyarakat Desa Kampala”. (Wawancara, Kardi, 23, Agustus 2023) .

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu dengan anggota pokdarwis singaken yang mengatakan bahwa:

“...Tidak ada kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan objek wisata ini. Semua pembangunan yang ada di Pantai Jono menggunakan dana milik priadi dibantu oleh masyarakat Desa”.(Wawancara, Suyanto, 23 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa kurangnya perhatian yang pemerintah berikan terhadap potensi alam yang dimiliki oleh daerahnya terutama dalam sektor pariwisata sangatlah merugikan. Dikarenakan jika saja pemerintah daerah Kabupaten Batubara mau memperhatikan hal tersebut maka akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kampala yang tinggal disekitar Pantai Jono.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak melakukan kerjasama dengan pemilik pantai dan juga masyarakat Desa di Batubara. Karena kurangnya perhatian

pemerintah daerah berikan terhadap pengelolaan objek wisata ini. Ini berarti tidak sesuai bahwa kerjasama adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena pemerintah kurang terlibat dalam pengelolaan objek wisata tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

3. Sarana dan Prasarana Yang Belum Lengkap

Sarana dan prasarana merupakan pelengkap daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana dan prasarana di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif dan kualitatif, lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana dan prasarana wisata yang dimaksud. Sarana dan prasarana yang belum tersedia membuat objek wisata tidak begitu maksimal dalam pengelolaannya. Dan itu juga dirasakan oleh pemilik pantai dalam mengelola objek wisata Pantai Jono.

Sarana pariwisata merupakan ujung tombak kepariwisataan. Dapat diartikan sebagai usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata dimana keberadaannya sangat bergantung kepada wisatawan pada adanya kegiatan pelayanan wisata, akan tetapi sarana dan prasarana yang belum tersedia membuat objek wisata Pantai Jono tidak maksimal dalam pengelolaannya. Dan itu juga yang dirasakan oleh pengelola pantai Jono.

Padahal dalam sebuah objek wisata harusnya ada fasilitas seperti akomodasi seperti hotel, tempat belanja seperti swalayan, dan resto. Kemudian fasilitas umum seperti telpon umum, sarana informasi, papan petunjuk arah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan objek wisata alam Pantai Jono jika sarana dan prasarana lengkap maka minat wisatawan untuk berkunjung akan semakin meningkat. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu informan yaitu pengurus Pantai Jono mengatakan bahwa:

“...Salah satu yang menjadi penghambat dalam mengelola objek wisata alam Pantai Jono kurangnya dana untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang dan juga fasilitas yang telah rusak perlu diperbaiki atau diganti”. (wawancara MR, 23 Agustus 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh BJ selaku pengurus Pantai Jono yang mengatakan bahwa:

“...Sarana dan prasarana yang ada di pantai ini masih kurang memadai. pengunjung hanya dapat menggunakan fasilitas seperti kolam renang, villa dan juga tempat pemancingan saja. Oleh karena itu pemilik pantai beserta anggota pokdarwis berusaha untuk segera memperbaiki fasilitas yang rusak tersebut”. (Wawancara, BJ, 23 Agustus 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh pemilik Pantai Jono yang mengatakan bahwa:

“...Untuk penyediaan sarana dan prasarana di objek wisata alam Pantai Jono seperti fasilitas masih kurang apalagi fasilitas yang sudah ada sebagian tidak berfungsi lagi, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa lagi-lagi kami keterbatasan dana dalam pengelolaan objek wisata alam Pantai Jono sehingga untuk melengkapi fasilitas di Pantai Jono masih lambat”. (Wawancara, Kardi, 23 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di objek wisata alam pantai Jono masih kurang memadai dikarenakan masih minimnya dana serta

banyaknya fasilitas sarana dan prasarana yang sudah rusak dan perlu segera di perbaiki sehingga pengunjung dapat menggunakan kembali fasilitas yang ada.

4.3 Pembahasan

1. Pengawasan Partisipatif dalam Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Batubara

Pengawasan pariwisata, selain dapat digunakan sebagai salah satu sumber pemasukan daerah juga dapat digunakan sebagai sarana melestarikan budaya dan kearifan lokal. Dengan melihat beragamnya potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten batubara, Pemerintah Daerah sebagai salah satu stakeholder pengembang pariwisata sudah seharusnya dapat mengoptimalkan potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batubara.

Pengawasan yang dilakuka oleh pemerintah dengan memberikan motivasi melalui program sosialisasi dan promosi wisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga terus mengupayakan kalangan investor dan pengusaha wisata agar tertarik turut mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Batubara, namun peneliti melihat upaya tersebut juga masih belum optimal, sehingga investor dan pengusaha wisata selama ini belum tertarik untuk ikut mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Batubara. Hal tersebut dapat dilihat dari masih sepiunya kegiatan usaha dan pengembangan yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti di Pantai Jono, Laut Tador, Pantai Bunga dan lain sebagainya.

Selain itu pemerintah daerah juga memberikan fasilitator terhadap objek wisata dengan ada upaya pemerintah daerah tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana prasarana di obyek wisata, seperti pembangunan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pokok pariwisata, sampai dengan pembangunan fasilitas

pendukung usaha pariwisata. Selanjutnya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga berupaya untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan dana pengembangan usaha melalui pengajuan bantuan pada PNPM mandiri, selain itu fasilitas juga diberikan pada investor dan pengusaha wisata dalam bentuk bantuan promosi obyek wisata swasta, sampai dengan pemberian informasi pada pengusaha wisata seperti lokasi lahan potensial usaha wisata, potensi wisata yang belum tergarap dan lain sebagainya.

Khusus untuk penyediaan sarana prasarana obyek wisata, peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga masih sangat dominan, sedangkan pada realitanya sumber anggaran yang dimiliki dinas terbatas, sehingga sarana prasarana di beberapa obyek wisata terlihat masih sangat kurang jumlahnya, seperti di Pantai Bunga, Pantai Wisata, dan Pantai Jono. Faktor yang paling mempengaruhi adalah masih minimnya partisipasi dari pihak ketiga dalam pengembangan pariwisata yang secara tidak langsung memaksa pemerintah daerah sebagai stakeholder pengembang wisata untuk memfasilitasi sebagian besar sarana prasarana yang terdapat di Obyek Wisata, akibatnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah tersebut seakan akan hanya habis untuk membiayai penyelenggaraan di obyek obyek wisata.

Pemerintah juga memberikan dinamisator sebagai upaya dinamisasi antar stakeholder pengembang pariwisata di Kabupaten Batubara, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga selama ini telah melakukan berbagai hal terkait dengan kerja sama antar sektor, baik itu sektor swasta, sektor pemerintahan lainnya, maupun masyarakat. Upaya dinamisasi ini utamanya diwujudkan melalui berbagai

kesempatan dialog mengenai perkembangan pariwisata dengan pihak-pihak tersebut.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata, bahwa masyarakat turut dilibatkan untuk berpartisipasi dalam perencanaan untuk mengembangkan tempat wisata ini adalah masyarakat pada umumnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dibutuhkan untuk menarik daya kreatifitas apa yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat tercipta suasana yang baru dan belum pernah ada sebelumnya di Kabupaten Batubara.

Perencanaan pengembangan objek wisata aspirasi masyarakat sangatlah di dengarkan penjabarannya karena merekalah yang akan terjun langsung sebagai penyelenggara dan secara umum sebagai unsur partisipatif untuk terus mengembangkan objek wisata selanjutnya. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah partisipasi langsung dalam mengembangkan objek wisata di wilayahnya.

Pengembangan pariwisata dalam hal ini melibatkan semua lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah, baik kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat biasa diharapkan turut membantu dan menunjang keberhasilan pengembangan pariwisata. Dilihat dari sisi partisipasi masyarakat, strategi ini lebih memungkinkan timbulnya keikutsertaan masyarakat, pemerintah pulau pandang dan pemerintah daerah batubara untuk memajukan obyek wisata pulau pandang yaitu mulai dari pengelolaan dan pelayanan telah melibatkan masyarakat secara luas.

Masyarakat juga mengelola langsung dan menentukan petugas-petugas objek wisata secara khusus, dengan demikian tidak akan timbul lagi kesenjangan

dimata masyarakat terkait dengan pelayanannya. Terkait dengan bagaimana seorang pekerja menjalankan fungsinya maka akan ada pihak yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi tempat wisata.

2. Faktor yang menghambat dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Batubara

Dana yang digunakan untuk mengelola objek wisata masih kurang untuk memperbaiki setiap fasilitas yang rusak. Dan seandainya pemerintah daerah ikut ambil bagian dalam pengelolaan objek wisata ini, maka pembangunan objek wisata tersebut tidak akan mengalami kendala.

Untuk mengelola objek wisata alam Pantai Bunga memerlukan dana yang besar. Kemudian penyediaan fasilitas sarana dan prasarana salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan minat wisatawan untuk datang berkunjung di Objek Wisata.

Kurangnya Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan dan pengelolaan objek wisata khususnya objek wisata alam Pantai Bunga memang harus dilakukan agar lebih cepat pembangunannya. Dengan suntikan dana yang diberikan dari pemerintah daerah dapat membantu proses pembanguan pengelolaan objek wisata.

Kurangnya perhatian yang pemerintah berikan terhadap potensi alam yang dimiliki oleh daerahnya terutama dalam sektor pariwisata sangatlah merugikan. Dikarenakan jika saja pemerintah daerah Kabupaten Batubara mau memperhatikan hal tersebut maka akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang tinggal disekitar Pantai Jono.

Pemerintah tidak melakukan kerjasama dengan pemilik pantai dan juga masyarakat Desa di Batubara. Karena kurangnya perhatian pemerintah daerah berikan terhadap pengelolaan objek wisata ini. Ini berarti tidak sesuai bahwa kerjasama adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena pemerintah kurang terlibat dalam pengelolaan objek wisata tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Sarana dan prasarana merupakan pelengkap daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana dan prasarana di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif dan kualitatif, lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana dan prasarana wisata yang dimaksud. Sarana dan prasarana yang belum tersedia membuat objek wisata tidak begitu maksimal dalam pengelolaannya. Dan itu juga dirasakan oleh pemilik pantai dalam mengelola objek wisata.

Sarana pariwisata merupakan ujung tombak kepariwisataan. Dapat diartikan sebagai usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata dimana keberadaannya sangat bergantung kepada wisatawan pada adanya kegiatan pelayanan wisata, akan tetapi sarana dan prasarana yang belum tersedia membuat objek wisata objek wisata tidak maksimal dalam pengelolaannya. Dan itu juga yang dirasakan oleh pengelola Objek wisata.

Padahal dalam sebuah objek wisata harusnya ada fasilitas seperti akomodasi seperti hotel, tempat belanja seperti swalayan, dan resto. Kemudian fasilitas umum

seperti telpon umum, sarana informasi, papan petunjuk arah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan objek wisata jika sarana dan prasarana lengkap maka minat wisatawan untuk berkunjung akan semakin meningkat.

Sarana dan prasarana yang ada di objek wisata alam pantai Jono masih kurang memadai dikarenakan masih minimnya dana serta banyaknya fasilitas sarana dan prasarana yang sudah rusak dan perlu segera di perbaiki sehingga pengunjung dapat menggunakan kembali fasilitas yang ada.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Partisipasi yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan memotivasi dan memberikan fasilitator dalam pengembangan objek wisata serta memberikan dinamisor kepada pihak pengembang dan masyarakat disekitar objek wisata
2. Partisipasi masyarakat merupakan partisipasi yang aktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan, pengawasan dan evaluasi dalam program pengembangan objek wisata Kabupaten Batubara. Selain itu adanya partisipasi masyarakat di bidang sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat di bidang promosi objek wisata, partisipasi pemeliharaan kebersihan objek wisata dan Pemeliharaan Keamanan Dan Kenyamanan bagi pengunjung objek wisata.
3. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan dalam pengelolaan objek wisata masih kurangnya dana yang diperoleh untuk memperbaiki setiap fasilitas-fasilitas yang rusak di Pantai Jono dan tidak adanya kerja sama dengan pemerintah daerah, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap.

5.2 Saran

Berkenan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis juga akan memberikan beberapa saran yang dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Batubara masyarakat setempat, dan juga penulis.

1. Objek wisata memiliki nilai jual yang sangat tinggi sehingga mampu menarik minat pengunjung/wisatawan untuk berkunjung. Partisipasi yang masyarakat setempat miliki mampu mengelola objek wisata jauh lebih baik dari sebelumnya.
2. Andai saja pemerintah Kabupaten Batubara lebih mau ikut ambil bagian dalam mengelola objek wisata maka akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak retribusi yang diambil dari para pengunjung yang datang ke objek wisata, serta akan juga meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Desa desa dekat objek wisata
3. Penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat dan untuk peneliti selanjutnya supaya lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga dalam melakukan penelitian terdapat data yang baru untuk dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Egerton, L. B. (2015). *Kutipan Artikel dan Pendapat Muasaroh tentang Efektivitas-efektifitas Suatu Program, Individual and Society*. Raja Grafindo Persada.
- Hilyana, S., (2011). Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Karakteristik Kultural dan Struktural Masyarakat Lokal di Lombok Barat. Tesis. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Oka yoeti, 2017. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta : PT. Paramita
- Nyoman S. 2010. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- James Spillane. 2011. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Kanisius. Yogyakarta.
- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 13–25.
- Siagian, S. P. (2016). *Sistem Informasi Manajemen, Bumi Aksara*. Jakarta.
- Isbandi, Rukminto. (2017). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI Press
- Slamet*. Achmad, (2013). *Penganggaran Perencanaan dan Pengendalian Usaha*. Semarang: UNNES PRESS.
- Santoso. R.A. (2015). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni.
- Bagiyono. (2017). *Pariwisata dan Perhotelan*. Bandung:Alfabeta
- Prabaningrum, L., Moekasan, T.K., Setiawati, W., Prathama, M., Rahayu. A., (2016). *Modul Pendampingan Pengembangan Kawasan Pengelolaan Tanaman Terpadu Cabai*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hortikultura Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Sondang P. *Siagian*. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara,. Jakarta. Sondang P. *Siagian*

LAMPIRAN

Dokumentasi di Kantor Disporabudpar Batubara



Acc. 15/08/2023
Dr. Jehan Rizki Rizki, M.S.

DRAFT WAWANCARA

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PENGELOLAAN OBJEK PARIWISATA DI KABUPATEN BATUBARA**

A. Indikator pengawasan

1. Menentukan ukuran pelaksanaan proses pengawasan.
 - a. siapa yang menentukan pelaksanaan proses pengawasan partisipatif di Kabupaten Batubara?
 - b. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan partisipatif di Kabupaten Batubara?
 - c. mengapa perlu adanya proses pelaksanaan pengawasan partisipatif di Kabupaten Batubara?
 - d. Apa bentuk pelaksanaan proses pengawasan partisipatif di Kabupaten Batubara?
 - e. Dimana pelaksanaan proses pengawasan partisipatif di Kabupaten Batubara?
 - f. Kapan pelaksanaan proses pengawasan partisipatif di Kabupaten Batubara?
2. Memberikan penilaian pada proses pengawasan
 - a. Siapa yang memberikan penilaian pada proses pengawasan partisipatif di Kabupaten Batubara?
 - b. Bagaimana proses penilaian pada proses pengawasan partisipatif di Kabupaten Batubara?
 - c. Mengapa perlu dilakukan proses penilaian pada pengawasan di Kabupaten Batubara?
3. Mengadakan korektif pada proses pengawasan partisipatif.
 - a. Siapa yang mengadakan korektif pada dinas pariwisata di Kabupaten Batubara?
 - b. Bagaimana bentuk korektif yang dilakukan dinas pariwisata di Kabupaten Batubara?
 - c. Mengapa perlu dilakukan korektif pada dinas pariwisata di Kabupaten Batubara?

B. Pengelolaan Objek Pariwisata

1. Adanya atraksi (pengelolaan objek pariwisata)
 - a. Siapa yang melakukan tindakan atraksi dalam pengelolaan objek pariwisata di Kabupaten Batubara ?
 - b. Mengapa perlu dilakukan tindak atraksi dalam pengelolaan objek pariwisata di Kabupaten Batubara ?
 - c. Apa saja tindakan atraksi dalam pengelolaan objek pariwisata di Kabupaten Batubara?

- d. Bagaimana bentuk tindakan atraksi dalam pengelolaan objek pariwisata di Kabupaten Batubara?
 - e. Kapan atraksi pariwisata di Kabupaten Batubara dilaksanakan?
 - f. Dimana dilaksanakan nya atraksi pariwisata di Kabupaten Batubara?
2. Adanya aksesibilitas (pengelolaan objek pariwisata)
- a. Siapa yang melakukan proses aksesibilitas pada pengelolaan objek wisata di Kabupaten Batubara?
 - b. Mengapa dilakukannya aksesibilitas pengelolaan objek wisata di Kabupaten Batubara?
 - c. Apa saja tindakan aksesibilitas dalam pengelolaan objek pariwisata di Kabupaten Batubara?
 - d. Bagaimana proses aksesibilitas dalam pengelolaan objek pariwisata di Kabupaten Batubara?
 - e. Kapan dilaksanakan nya proses aksesibilitas dalam pengelolaan objek pariwisata di Kabupaten Batubara?
 - f. Dimana dilaksanakannya aksesibilitas pengelolaan objek pariwisata di Kabupaten Batubara?
3. Adanya fasilitas
- a. Apa saja fasilitas yang disediakan dalam pengelolaan objek pariwisata di Kabupaten Batubara?
 - b. Bagaimana proses pengadaan proses sarana prasarana atau fasilitas pariwisata di Kabupaten Batubara?
 - c. Mengapa perlu dilakukan perbaikan fasilitas pariwisata di Kabupaten Batubara?
 - d. Di mana fasilitas atau sarana prasarana didapatkan?
 - e. Siapa yang mengadakan fasilitas?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 11 Juli 2023

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TRI KURNANI
N P M : 1803100088
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 122,0 sks, IP Kumulatif 3,17

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas Pengawasan Kinerja Pemecah batu-bara dalam mengatasi permasalahan Sampah.	
2	Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Pengelolaan Objek Pariwisata dikabupaten batu-bara	Acc 11/5/23
3	Implementasi Rencana no 1 tahun 2019 tentang Program keluarga harapan di rantau adat.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Pemohon

Rekomendasi Ketua Program Studi :

Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 11 Juli 2023

Ketua,

(ALEXANDRA MAHARORA, S.Sos M.Si
NIDN: 0122119001

058

Tri Kurnani

(TRI KURNANI)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk Program Studi

(Dr. Jehan Rihho Zaharsyah, S.Sos M.Si
NIDN: 011019201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 1321/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **11 Mei 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **TRI NURANI**
N P M : 1803100088
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENGELOLAAN OBJEK PARIWISATA DI KABUPATEN BATU BARA**

Pembimbing : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 058.18.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 11 Mei 2024.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 08 Muharram 1445 H
25 Juli 2023 M



Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Nomor : 1533/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023
Lampiran : -.-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 01 Shafar 1445 H
18 Agustus 2023 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Batu Bara

di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

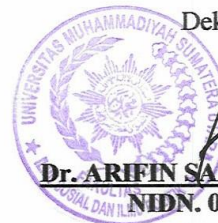
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **TRI NURANI**
N P M : 1803100088
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENGELOLAAN OBJEK PARIWISATA DI KABUPATEN BATU BARA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



Dekan
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjawab surti ini agar disebutkan nomor dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://iisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Medan,20....

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : TRI LURAH
N P M : 1803100088
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 18.21/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/20.23 tanggal 11 Mei 2023 dengan judul sebagai berikut :

Efektifitas Pengawasan Partisipatif Dalam Pengelolaan Objek Pariwisata Di Kabupaten Batu Bara.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyerahi
Pembimbing

(DR. TEHAN RICHIE AZHARSYAH, S.Pd, M.Si)

NIDN: 01709201

Pemohon,

(TRI LURAH)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1328/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2023
Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Lab FISIP UMSU Gedung C
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	REZA AKHYAR	1903100024	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., MAP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG DALAM PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA TUNAS HARAPAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
2	FETRY HURIANISYA	1903100019	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS KOORDINASI VERTIKAL KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM PROGRAM KESEHATAN DI KELURAHAN SENTANG KABUPATEN ASAHAN
3	TIKA RIZKI SAFIRA	1903100059	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., MAP.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA DI DESA MARTEBING SERDANG BEDAGAI
4	MHD. AZWIN	1903100011	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKN) DI KABUPATEN BATUBARA
5	TRI NURANI	1803100088	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	Dr. JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENGELOLAAN OBJEK PARIWISATA DI KABUPATEN BATU BARA

Medan, 09 Muharram, 1445 H

28 Juli 2023 M





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln. Besar Desa Perupuk Dusun III Kecamatan Lima Puluh Pesisir - 21255

Perupuk, 23 Agustus 2023

Nomor : 071/1337
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth :
DEKAN Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-

Tempat

Menindaklanjuti surat dari UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1533/KET/II.3AU/UMSU-03/F/2023, Tanggal : 18 Agustus 2023 Perihal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian untuk bahan penyusunan skripsi.

NO	NPM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	1803100088	TRI NURANI	Ilmu Administrasi Publik

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas
Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Batu Bara

Drs. SAPRI, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19700710 199801 1 002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fislip.umsu.ac.id> ✉ fislip@umsu.ac.id 📱 [umsuMEDAN](#) 📺 [umsuMEDAN](#) 📺 [umsuMEDAN](#) 📺 [umsuMEDAN](#)

SK-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : TRI KURAMI
N P M : 1803100088
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGEWAHAN PARTISIPATIF DALAM PENGELOLAAN
OBJEK PARIWISATA DI KABUPATEN BATU BARA

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
01	4/Jul/2023	• Revisi latar belakang masalah, Uraian teoritis, metode Penelitian, kategorisasi Penelitian	
02	4/Jul/2023	• Revisi latar belakang masalah, uraian teoritis, kategorisasi Penelitian	
03	12/Jul/2023	• Revisi latar belakang, kategorisasi	
04	27/Jul/2023	• Acc Seminar Proposal	
05	09/Agus/2023	• Revisi Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan	
06	14/Agus/2023	• Revisi Bab 4 : Pembahasan	
07	20/Agus/2023	• Revisi Bab 5 : Saran	
08	28/Agus/2023	• Acc skripsi	

Medan, 28 Agustus 2023.

Dekan,

Dr. Arifan Saleh S.Sos.M.P.
NIDN : 0030017402

Ketua Program Studi,

Ananda Muhammadika S.Sos.M.P.
NIDN : 0122118801

Pembimbing,

Dr. Jekun Rahmeharyans S.Sos.M.Si
NIDN : 01179201





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](https://www.instagram.com/perpustakaan_umsu)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 659/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Tri Nurani
NPM : 1803100088
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Syawal 1444 H.
12 Mei 2023 M.

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN
No. 487/KET/KESKAP/IX/2023

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Tri Nurani
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Efektivitas Pengawasan Partisipatif Dalam Pengelolaan Objek Pariwisata di Kabupaten Batubara
Jumlah Halaman : 8 Halaman
Penulis : Tri Nurani

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 05 September 2023

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI


Nomor : 698/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Rabu, 08 Mei 2024
 Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	TRI NURANI	1803100088	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENGELOLAAN OBJEK PARIWISATA DI KABUPATEN BATU BARA
2						
3						
4						
5						

Total : 1 mhs ⁵⁰⁶⁹⁰¹²⁴ _{50m}

Medan, 27 Syawal 1445 H
 06 Mei 2024 M

Ditandatangani oleh :
 Rektor

 Prof. Dr. Pratiwi M. Arifin, SH, M.Hum



Ketua : 
 Sekretaris : 
 Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

